

Dalam Bahaja.

APAKAH KITA AKAN MENDJADI HEIHO DALAM PERANG IMPERIALIS ATAUKAH SEBAGAI LAKI² AKAN MEMPERTAHANKAN KEHORMATAN KITA SEBAGAI BANGSA DAN NEGARA MERDEKA ?

KEADAAN jg. ruwet sekarang didalam angk. perang, harus lekas² ditjari penjelesaiannya. Kalau tidak tentu akan membahayakan pada keselamatan negara dan masjarakat kita umumnya, sebab angkatan perang itu adalah salah satu alat negara jang mendjadi parit pagar negara jang mendjaga kehormatan negara, mempertahankan kedaulatan negara serta melindungi masjarakat daripada keruntuhan. Hal ini sudah dibuktikan oleh kedjadian² terachir dinegara² Arab, terutama di Mesir. Tapi bila keadaan angkatan perang kita tetap seperti sekarang ini adanya, maka tidak adalah harapan sama sekali, bahwa ia akan dapat mendjalankan salah satu tugas jang tersebut diatas, djanjikan lagi semuanya.

Adapun persoalan angkatan perang kita sekarang ini terutama mengenai tiga hal jang teramat penting. Pertama soal adanya perbedaan faham dan pendirian mengenai kedudukan angkatan perang pada umumnya, kedua mengenai pimpinan angkatan perang (kebidjaksanaannya) dan ketiga mengenai pemakaian perbelanjaan oleh angkatan perang. Tentang ketiga soal itu pembatja dipersilahkan membatja lebih djauh surat Bayangkari Negara jang kita muatkan dalam bagian lain.

Soal pandangan mengenai angkatan perang itu memang sangatlah pentingnja. Lebih² bagi kita sebagai satu negara dan bangsa jang baru merdeka, jang belum sembuh sama sekali dari penjakit² kolonialisme dan dimana masjarakat kita susunannya masih tetap seperti susunan masjarakat kolonial. Pandanganlah jang terutama dan pertama kali harus dibetulkan dan bila pandangan ini sudah betul barulah kita dapat menetapkan pendiri-

an dan mengambil sikap atau tindakan jang tepat. Bila pandangan itu tidak betul, maka pimpinan, sekalipun ada, akan tidak, ada gunanja dan begitu pula, perbelandjaan, sekalipun ribuan djuta rupiah disediakan akan tidak ada manfa'atnya bagi keadjuan angkatan perang. Inilah jang di-chawatirkan akan terdjadi didalam angkatan perang kita, bila tidak lekas² diadakan penjelesaian jang tepat.

Sebelum mengupas lebih djauh tentang pandangan, pendirian dan faham ini, lebih dulu harus kita ketahui beberapa kenjataan sekarang didalam angkatan perang kita, baik angkatan darat maupun angkatan laut dan udara.

Didalam angkatan perang kita sekarang ada dua golongan besar, jaitu golongan jang berasal dari T.N.I. dan golongan jang kita terima dari Belanda, jaitulah bekas Knil. Selain daripada itu ada lagi Missi Militer Belanda.

(Sambungan ke halaman 2)



MINGGUAN UMUM MEMBANTU PERDJUANGAN INDONESIA
Isinja diluar tanggungan Pertj. SENO N.V. Djakarta.

Politik bebas jang Dipengaruhi
Peliharalah Indonesia kita ini.

DENGAN adanya pertentangan² jang kian hari bertambah memuntjak djuga kelihatannya ditanah air ini, maka soal „politik bebas” bukan lagi seharusnya mendjadi kepunjaan pemerintah „sendiri”, dengan arti kata „kebidjaksanaan politik luar negeri kepunjaan sebuah kementerian” ataupun kepunjaan satu-dua orang jang merasa dan mengaku berhak-penuh untuk memakai „politik bebas” dengan kebebasan menurut ukurannya sendiri !

Bertahun² sudah kita bosan mendengarkan teriakan beberapa orang dari banjak matjam partai dan aliran jang untuk mengabui mata rakjat menggunakan sembojan „politik bebas”, dengan maksud tidak lebih dan tidak kurang, guna meluaskan pengaruh partainya atau alirannya, supaya mudah merebut segala matjam kursi, pangkat, kedudukan, status jang akan merobah nasib partainya, alirannya, dan dirinja (erhitung sanak saudara dan handai taulannya).

Lagu ini sudah dilagukan semendjak partai² dilahirkan sesudahnja Djepang kapitulasi dan dilahirkannya proklamasi. Lagu politik ini sudah dihafalkan dan dinjanjikan oleh banjak orang jang selama hidupnya belum pernah pula beladjar bernjanji, dalam arti kata „njanjian politik” jang bersedjarah sendiri.

Kakaktua, nuri, bajan dapat diadjar bernjanji, sekalipun njanji jang menyerupai „adjaran tuannya.” Dalam negara kita jang berpantjasila ini kelihatan pula dengan njata, bagaimana orang² dari beberapa partai dan aliran „diadjar” bernjanji, disuruh hafalkan beberapa lagu jang lebih kurang dan sedikit-banjak menyerupai lagu „politik bebas” jang dijdadikan topeng untuk menjesatkan rakjat kepada tudjuan lain dari jang dimaksudkan oleh sumpah proklamasi.

Orang² pintar kita jang memulai sedjarahnja untuk mendjadi orang, sesudah merah-putih berkibar, memegang peranan penting dalam hal ini. Dalam segala kementerian, disegenap djawatan, dan dalam beberapa organisasi rakjat dewasa ini bertjokol amatlah banjaknya manusia-manusia djenis ini, jang sudah boleh dipastikan mulai sekarang, TIDAK AKAN MENJELAMATKAN RAKJAT DAN NEGARA !

Tjukuplah Belanda berabad² mengadjar kita bermimpi, tjukuplah Djepang memperkosa kita tunduk dengan kekedjaman dan

kekerasan, dan tidaklah seharusnya lagi, dalam negara jang sudah berdaulat, kita masih terus menerus suka dan sudi dipermainkan dan dikendalikan oleh orang² jang terang²an musuh rakjat dan pemimpin palsu jang PASTI TIDAK AKAN MENDATANGKAN KESELAMATAN RAKJAT DAN NEGARA !

PROKLAMASI dilahirkan dipulau Djawa, dikota Djakarta jang sekarang dijdadikan pusat pemerintah oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia jang Berpantjasila.

Disamping segala kemegahan, kemewahan, kementerian jang terdapat dipulau Djawa ini, maka sehari² bosan dan dijdjik, ngeri kita melihat keruntuhan ahlak, merupakan kepintjangan² peraturan, pelanggaran² jang terang-terangan, penjeludupan besar-besaran, korupsi hebat²an, dan gangguan keamanan ! Tjek-tjok perkara kursi, perkara rumah gedung, perkara mobil, perkara segala matjam.

DALAM KEKUSUTAN KITA SEPERTI INILAH, PENGARUH ASING DIMASUKKAN ORANG KEDALAM MASJARAKAT KITA DENGAN HALUS-TERAT²JR. DENGAN MENGGUNAKAN ORANG²NJA JANG SUDAH TERLATIH, DIBANTU PULA OLEH TENGKULAK² BANGSA KITA SENDIRI JANG SELALU ADA DALAM TIAP NEGARA JANG BELUM TER-

SUSUN-RAPL DAN DJANGAN LUPA DENGAN PERBELAN-DJAN JANG LEBIH DARI TJUKUP !

Dengan memperhatikan suara pers setiap hari, kita sudah dapat menarik kesimpulan, bahwa dikalangan wartawan sendiri, bukanlah sedikit djumlah orang jang tidak termungkir lagi, mendjadi perkakas orang lain, digunakan orang lain. Setengahnja tentu dengan mendapat bajaran tjukup dalam pekerjaan itu dan lainnja lagi sebab memang baru beladjar „berjanji.” Djanganlah marah kepada katak dibawah tempurung, jang sebab menjanjikan dua-tiga lagu jang disukai orang lain, dengan mendadak „dipanggil beladjar” keluar negeri ataupun „disuruh beladjar” kenegeri lain. Djangan tanja, „siapa” jang mengundang, dan tidak usahlah tahu, „siapa” jang mengutus keluar !

Bagaimana nantinja kalau sudah pulang dari „beladjar” dan „menindjau” ? Kalau jang tadinja sebelum berangkat, memang sudah „budak orang” ? Kembalinja kemari, jah, mendjadi kaja dan dirikan ini, dirikan itu ! Hubungan korrespondensinja ke-luar-pun amatlah sibuknja, hubungannya dengan perwakilan negeri-tempat-berutang-budi itu-pun agak selalulah ! Namanja sudah ditjatat oleh djawatan rahasia asing, jang „saban diperlukan tenaga dan suaranya tentu tidak dilupakan !” INI BUKAN RAHASIA LAGI BAGI RAKJAT JANG SADAR ! Kalau jang tadinja sebelum berangkat bersuara amat kiri, ekstrim, malah berbau anarsisme atau chauvinisme, maka sekembalinja dari „beladjar”, pertjajalah, dengan sendirinja s u d a h banjak kemadjuan berpikir ; tjuma sajanja KEMADJUAN JANG MENGUNTUNGAN LAWAN !

Tjontoh² dikiri kanan kita sudah tjukup banjak untuk dipeladjar bagi siapa jang masih suka memikirkan keselamatan rakjat dan negaranya. Dengan

(Sambungan ke halaman 2)



(Sambungan dari halaman 1)

ANGKATAN PERANG/NEGARA DALAM BAHAJA.

Negeri kita adalah bekas djajahan Belanda dan bangsa kita adalah bekas didjajah dan diperas oleh Belanda. Knil dan militer Belanda itu adalah bekas musuh kita, musuh kemerdekaan kita yang melanggar kedaulatan negara kita sedjak Proklamasi dan yang membunuh para pedjuang dan rakjat kita dimasa yang lampau dengan segala kekedjamaan dan kebuasannya, djuga terhadap rakjat yang tidak berdjaja apa?

Sekarang, setelah kedaulatan diserahkan oleh Belanda kepada kita dan Indonesia Merdeka lahir setjara „rasmi” sesudah perseudjuan KMB, maka permusuhan antara kita dengan Belanda setjara rasmi pun diachiri pula. Setjara rasmi, karena pada hakikatnya permusuhan itu belum tentu berhenti, terbukti dari sikap Belanda selama ini, terutama mengenai Irian, dan terbukti pula dari soal keamanan, yang sedjak merdeka setjara „rasmi” itupun, masih terus menerus sadja dikatjaukan oleh pihak Belanda. Djadi sebenarnya dalam bathinnja, Indonesia dan Belanda itu belum bisa damai, dan memang sudah semestinja begitu, selama masjarakat dan negara kita masih belum sembuh sama sekali daripada penjakit kolonialisme dan kolonialisme disegala lapangan dan tingkatan masjarakat itu adalah „pendjelmaan-Belanda” dinegeri kita ini yang hendak dipertahankannya terus dengan segala tenaga yang ada padanja. Dan..... sajang sekali.....harus kita akui bahwa tenaganya itu masih banyak nian dinegeri kita sekarang, salah satu diantaranya yang njata dan berbahaja betul ialah adanya Missi Militer Belanda yang djustru harus masuk dan diterima..... didalam angkatan perang kita.

Pada zabirnja, sekalipun tidak bermusuhan lagi, setidaknja toh harus diakui bahwa kita sekarang

dalam bersengketa dengan Belanda? Dan belum tentu sengketa itu akan dapat dihindarkan dengan lekas. Mungkin meningkat mendjadi lebih buruk.

Dengan adanya perdjuaan berat yang harus kita djalankan dilapangan ekonomi, untuk mempertahankan dan mendjaga keselamatan kehidupan nasional kita, sudah terasa bahwa yang terutama, pihak Belandalah yang mendjadi lawan kita, karena merekalah yang lebih banyak mempunyai hal² yang djamin oleh KMB. Bila ditambah pula dengan hak² yang lainnja, seperti adanya tenteranja didalam angkatan perang kita, sekalipun namanja sebagai instruktur sadja, nistjajalah posisi Belanda dinegeri ini akan mendjadi sangat kuat.

Dan melihat politik yang djalankan dan yang bisa djalankan oleh tiap² pemerintah Indonesia sekarang ini, maka dilapangan ekonomi sadja kita tidak akan sanggup berdiri diatas kaki dan tenaga kita sendiri, karena sampai sekarang belum ada satu pemerintah yang berani dengan tegas menarik garis perpisahan, sekalipun untuk djangka panjang, antara perekonomian nasional kita dengan perekonomian modal monopoli asing (imperialisme). Ini berarti bahwa ekonomi Indonesia (njawa negara dan rakjatnja) akan selalu tergantung dan mendjadi „permainan” modal monopoli asing, yang berarti lagi bahwa alat² negara Indonesia (pemerintah sipil, tentara dan polisi) tidak boleh tidak tentu akan mendjadi perkakasnja belaka. Keperluan rakjat dan hidup rakjat sendiri akan tergantung dari belas kasihannya modal monopoli asing itu, dan yang lebih berbahaja lagi ialah bahwa Indonesia tidak akan bisa terlepas daripada terseret kedalam penjakit² stelsel kapitalisme, diantaranya yang paling kedjam dan buas ialah penjakit krisis.

Karena kepentingan ekonomi, oleh kaum imperialis selalu diichtiarkan agar terdjamin oleh kekuatan² militer dan strategie, maka dengan sendirinja dalam soal kemiliteran inipun, Indonesia tidak mungkin lagi terlepas daripada lingkungan kepentingan strategie kaum imperialis, yang pada waktu ini sudah kelihatan tanda²nja, hendak menimbulkan perang dunia ketiga. Untuk kepentingan modal raksasa monopoli, harus ada peperangan, karena perang itu perlu untuk mengobati krisis ekonomi buat sementara. Terikat pada ekonomi imperialis berarti terikat pula pada segala akibat²nja (krisis dan peperangan).

Tanda² yang dimaksudkan diantaranya ialah: Tidak sedianja Amerika untuk menghentikan perang Korea; dipaksakannya perdjandjian Sar Francisco kepada Djepang d.l.l. negara yang ikut menandatangani untuk memungkinkan dapat dipakainya rakjat Djepang mendjadi heiho dalam perang yang akan datang;

dibelanja terus Chiang Kai Shek di Taiwan oleh Amerika, agar bisa dipakai mendjadi umpan pelor, mula² ke Korea bersama² dengan heiho Djepang dan lama² untuk menjebu RRT, yang sedjak kemenangan revolusi Tiongkok (1949) adalah satu²nja negara di Asia yang sanggup dan berani mengusir kaum imperialis dari negerinja yang maha luas itu yang selama ini mendjadi pasaran bagus yang memberikan banjak keuntungan kepada kaum imperialis; persiapan² Amerika mulai dari Burma sampai ke Indo China; didjajahnya terus Irian Barat oleh Belanda untuk kepentingan strategie Amerika sebab dengan begitu lantasseluruh Indonesia dapat nanti dipakai oleh Amerika mendjadi pangkalan dan perbekalannya (bahan dan manusia). Adanja embargo pun telah mendjadi bukti bahwa Amerika hendak menguasai semua bahan.

Inilah beberapa kenjataan yang tidak dapat dipungkiri, sekalipun banjak orang yang masih memandang Belanda itu seolah² sebagai satu negara merdeka yang bisa hidup sendiri. Pendudukan Irian-Barat oleh Belanda dan adanya missi militer Belanda didalam angkatan perang kita jg. nota bene harus tunduk kepada disiplin dan komando tentara Belanda yang seterusnya harus tunduk pula kepada komando Amerika yang rasminja disebut komando-Atlantik) adalah dua keadaan yang sudah pasti termasuk dalam lingkungan rentjana Amerika dan embel²nja, yang bertudjuan:

1. Pendjadjahan dilapangan ekonomi untuk mendapat keuntungan yang berlebih-lebihan (super profit) dengan memeras dan memperbudak terus rakjat yang sudah „merdeka”.
2. Pemakaian negara² setengah djadjahan (alamnja dan rakjatnja) untuk kepentingan strategie Amerika dalam perang imperialis yang akan datang.

Inilah yang harus kita insjafi dalam menghadapi persoalan angkatan perang sekarang ini, agar dapat kita peroleh pandangan dan pendirian yang tepat dalam menjelekkannya. Persoalan angkatan perang yang bukan terbatas pada angkatan perang sadja, tapi meliputi negara dan rakjat kita, menentukan nasibnja dibelakang hari.

Itulah sebabnja maka angkatan perang didalam kepala karangan ini kita samakan dengan negara. Karena pentingnja. Bila angkatan perang dalam bahaja, dengan sendirinja negarapun terseret kedalam bahaja.

Itu pulalah sebabnja maka di Burma sampai sekarang tidak tertjapai perdamaian antara golongan yang memerintah dan golongan yang tidak menjtudjui perdjandjian dengan Inggeris, yang antara lain menentukan bahwa didalam angkatan perang Burma harus diterima pula British Military Mission (missi militer Inggeris). Sampai sekarang

(Sambungan dari halaman 1)

POLITIK BEBAS JANG DIPENGARUHI.

mendjalani lebih dahulu segala matjam siasat-asing yang sekarang meradjalela dinegeri kita inilah, negara orang lain sudah ada yang djadi perkakas NEGARA RAKSASA. Bedanja tjuma, yang satu adalah perkakas NEGARA IMPERIALIS dan yang lainnja PERKAKAS NEGARA „SOSIALIS.” Tetapi dalam prinsipnja sama, mereka itu adalah PERKAKAS! Mereka negara merdeka yang TIDAK DAPAT LAGI, DAN MEMANG TERHALANG berpolitik-BEBAS!

Begitulah kelak djadinja dengan NEGARA KITA INI.

Dan kalau sudah sampai dipuntjaknja, artinja sungguh² dalam masjarakat kita TERPE-TJAH DUA, kiri dan kanan, maka bersiap²lah kamu, wahai rakjat yang sudah tjukup banjak dan lama menderita, bahwa persatuan kebangsaan Indonesia akan hantjur lebur.....

Tidak satu Soekarno dapat melarangnja, tidak satu Hatta dapat mentjegahnja, tidakpun satu kabinet, lebih² tidak parlemen kita yang bentuk-susunanja seperti sekarang ini!

Kalau kita sekarang BELUM TERGADAI LAGI, BELUM DAPAT DIGADAIKAN DENGAN TERANG²AN DISIANG HARI, adalah disebabkan memang dalam masjarakat kita masih ada mereka, yang terdiri dari pemuda, pemimpin dan rakjat yang TETAP SETIA KEPADA SUMPAH PROKLAMASI.

perang saudara berdjalan terus di Burma dan beberapa hari yang lalu, daerah Shan sudah diumumkan berada dalam bahaja.

Sanggupkah pemerintah Burma sampai sekarang menolak adanya tentera Chiang Kai Shek yang sudah lama berada dan mengambil kedudukan serta mengatjau didaerah Burma?

Dan akan sanggupkah pemerintah Indonesia berbuat lain daripada pemerintah Burma nanti, bila perkembangan keadaan sudah sampai sedjauh itu di Indonesia?

Burma, Thailand, Vietnam-Bao Dai, Ch. K. Shek di Taiwan, Filippina dan Djepang sudah diikat mendjadi satu, untuk kepentingan kaum imperialis. Hanja Tiongkok dan India yang nampaknja tidak bisa dipermainkan begitu sadja. Dan Indonesia, kalau ia mau. Dan belum terlambat. Asal pandangan dan pendirian lekas dirobah, dan segera tampil kemuka sebagai seorang djantan, mempertahankan nama dan kehormatan negara dan bangsa yang merdeka. Bebas..... dalam arti kata yang sesungguhnyanja.

Tetapi ketahuilah bahwa djumlahnja dapat berkurang terus, dan akan semakin berkurang, bilamana dalam pemilihan umum yang akan datang, KAWAN² yang SERUPA INI tidak dengan tangkas bekerdja giat MEMBERI PENERANGAN SETJUKUPNJA kepada rakjat kita yang sebagian besar masih buta huruf dan buta politik.

SOAL PEMILIHAN UMUM, adalah SOAL PEREBUTAN STATUS POLITIK. Entahkan kita akan kemana dibawa oleh pemimpin² yang tentu sangat pandai bernjanji, namun kita tidak lebih selamat dibanding dengan pernah mendjadi makan-singa dan santapan dari penjembah-berhala dulu! Kita harus b e b a s, kita harus berdiritegak diatas STATUS KEMERDEKAAN NASIONAL, yang akan berdampingan dengan semua negara yang djuga mempunyai kemerdekaan nasionalnja masing², ada kerdja sama dengan status yang sama.

Kita bukan suatu bangsa yang lemah, miskin, tak berkebudajaan dan beradat lembaga, sehingga harus lebur mendjadi bangsa lain, hilang lenjap dari muka bumi sebagai bangsa..... Kita adalah satu bangsa yang kaja lahir dan bathin, sanggup melukis sedjarahnja dengan seindah²nja. Djanganlah lupakan itu!!!

Dalam segala kementerian, dalam segala djawatan, dalam segala organisasi rakjat yang teratur dan yang „tidak-teratur” kita tahu, masih tjukup ada kawan² yang akan menjelamatkan Negara Republik Pantjasila ini, maka tjarialah hubungan erat satu sama lain!

Sebelum terbentuk satu Front Nasional, yang satu saat mau tak mau HARUS MENDJELMA SENDIRINJA DISEBABKAN TEKANAN UAP-PERTENTANGAN JANG TAK TERTAHAN LAGI, maka mulailah dari sekarang mengadakan pengawasan, berhat², sesuai dengan kehendak NEGARA MERDEKA JANG BERPROKLAMASI; Kaki-tangan asing dan korruptor² harus dibasmi dengan tjara menurut keadaan dan tempat, sesuai dengan sumpah dan kehendak Negara Merdeka yang berproklamasi.

Negara ini kita turut mendirikan, maka kita djuga yang BERWADJIB PENUH memperbaiki segala kerusakan yang sedang berdjala dan masih mendatang, maka tidaklah sia², sudah beratus ribu djiwa pemuda yang sutji murni kita korbakan. Untuk KESELAMATAN TURUNAN BANGSA INDONESIA SAMPAI KEANAK TJUTJU, MASIH TJUKUP BANJAK PEMUDA DAN RAKJAT KITA BERSIAP SEDIA DJATUH MENDJADI KORBAN.

TIADA KORBAN HILANG PERTJUMA, PATAH TUMBUH HILANG BERGANTI!

B.

Marthaenis.

MENARA KITA

Terbit tiap² hari Sabtu.

Dikeluarkan oleh:

Penerbit „RADA”

Djl. Teuku Umar 25
Djakarta.

Direksi:

RKJ. RASUNA SAID
A. ANWAR

Redaksi:

BARIOEN A.S.

Harga langganan:

Rp. 6.— sebulan

Etjeran:

Rp. 1,75

Harga adpertensi 1 x
muat:

1 Halaman ... Rp. 500.—

½ Hal. „ 300.—

¼ Hal. „ 160.—

⅓ Hal. „ 90.—

1/10 Hal. „ 50.—

1/32 Hal. „ 30.—

Akibat Gagalnya Revolusi Nasional Indonesia.

Pimpinan yang ragu² hanya sanggup menjalankan politik reformis dan akhirnya menjerah.

Oleh : Bayaputera.

REVOLUSI NASIONAL INDONESIA MERUPAKAN TERUDJUNJA TUDJUAN PERDJUANGAN KEMERDEKAAN NASIONAL, JAITU HANTJURNJA BELENGGU KEKUASAAN KOLONIAL (IMPERIALISME) DAN FASISME-MILITERISME DARI BUMI INDONESIA DAN TERBENTUKNJA NEGARA INDONESIA MERDEKA JANG AKAN MELAKSANAKAN SUSUNAN KEHIDUPAN EKONOMI, POLITIK, SOSIAL DAN KEBUDAJAAN DIATAS DASAR NASIONAL JANG BEBAS SAMA SEKALI DARI PENGARUH ASING DAN TJAMPUR TANGAN IMPERIALISME DLM. SEGALA MATJAM BENTUK.

Dalam Revolusi Nasional itu, maka bangsa Indonesia tidak sadja telah dapat menguasai alat² negara, tetapi djuga seluruh alat² perekonomian. Dengan demikian, maka pada PERMULAANNJA Revolusi Nasional Indonesia itu dapat dikatakan telah berhasil menjapai kempangan. Artinja Revolusi itu telah MENEMPUH DJALAN JANG BENAR DAN TEPAT, JAITU DJALAN REVOLUSI MENENTANG IMPERIALIS UNTUK MENUDJU KEPADA KESEMPURNAAN PELAKSANAAN TUDJUAN PERDJUANGAN KEMERDEKAAN NASIONAL.

Tetapi dalam djalan perkembangan selanjutnja Revolusi Nasional itu telah menjimpang dari djalan benar yang ditempuhja semula, dengan diumumkannja Manifest Politik Pemerintah R.I. pada bulan Nopember 1945.

Penjimpangan djalan itu adalah merupakan permulaan dari kegagalan Revolusi Nasional Indonesia seperti keadaan yang kita alami sekarang ini.

Manifest Politik itu adalah adjud dari politik reformis, jaitu politik yang menjari bantuan dan kerdja sama dengan golongan imperialis dalam membangun Negara dan Masyarakat Indonesia diatas dasar Nasional. Politik sematjam itu adalah bertentangan sama sekali dengan kepentingan bagian terbesar dari Rakjat Indonesia, jaitu kelas buruh, tani, pengusaha² nasional dan lain² golongan yang ditindas dan dirugikan oleh imperialisme sedjak berabad² lamanya.

Kalau politik reformis yang sangat merugikan kepentingan Nasional itu dapat membelokkan Revolusi kita dari djalan revolusioner dan anti-imperialis yang menyebabkan kegagalannya, terutama disebabkan oleh karena kelas buruh, sebagai bagian yang paling sadar, yang berwatak revolusioner dan anti-imperialis dari Rakjat Indonesia dan menurut kodrat sedjarahnja harus menjadi pemimpin dari Revolusi, pertama, karena tidak memegang peranan pimpinan; kedua, belum terorganisasi dan terbimbing dengan baik dan ketiga, masih sangat kekurangan dalam pengertian tentang teori² Revolusi.

Keadaan kelas buruh yang demikian itulah yang menyebabkan djatuhnya pimpinan Revolusi Nasional Indonesia kedalam tangan golongan yang berwatak ragu² dan bimbang dan yang senantiasa berpemandangan politik yang berdasar reformisme menudju kapitulasi (menjerah).

Dibawah pimpinan golongan yang berpedoman kepada politik yang bangkrut itu, maka Revolusi Nasional menjapai puntjak kegagalannya didalam bentuk Persetudjuan KMB, hasil dari apa yang dinamakan tracee baru dan „kebidjaksanaan diplomasi rahasia.“

Saat diterimanja Persetudjuan KMB oleh K.N.I.P. pleno yang didorong untuk menghadapi fait-accomplis adalah merupakan permulaan dari tragedie nasional dalam Perjoangan Kemerdekaan Indonesia dan merupakan kegagalan se-penuhja dari Revolusi Nasional.

Memang, Persetudjuan KMB telah melahirkan Negara Republik Indonesia (permulaan pakai Serikat) yang „merdeka dan berdaulat penuh“ dan yang meliputi seluruh daerah Hindia Belanda dahulu — minus Irian Barat — lengkap dengan alat² negara yang dipimpin oleh bangsa Indonesia, dengan bendera, lagu dan bahasa nasional Indonesia. Tetapi pada hakekatnja sifat² kolonial (imperialistis) belum lenjap sama sekali dari Negara R.I. yang „merdeka dan berdaulat penuh“ itu. Karena, persetudjuan KMB yang menentukan kepada keradjaan Belanda untuk menjerahkan kedaulatan yang „complete (lengkap), real (njata) dan unconditional (tidak bersyarat)“ kepada Indonesia, ada menentukan pula kepada Indonesia untuk memberi kesempatan meradjalelanja modal raksasa monopoli asing menggaruk super-profit (keuntungan raksasa) di Indonesia, jaitu dengan djalan menjerahkan kembali perusahaan² asing kepada pemilik²nja dengan djaminan yang menguntungkan.

Dengan masih adanya modal raksasa monopoli yang meradjalela di Indonesia itu, maka Negara R.I. adalah Negara Setengah Djadjahan yang kedaulatannya tidak complete, tidak real dan tidak unconditional sebagai telah diakui pula oleh Presiden Sukarno dalam pidatonya pada Hari Ulang Tahun ketudjuh dari Proklamasi Kemerdekaan.

Dalam kedudukan setengah djadjahan itu, maka Negara R.I.

yang tidak menguasai kehidupan ekonomi adalah menjadi sumber bahan mentah, sumber tenaga buruh yang murah, daerah pasar dan tempat penanaman modal dari imperialisme sebagai halnya kedudukan Hindia Belanda dahulu.

Kedudukan yang sedemikian itu menjebabkan sangat tergantungnja keadaan ekonomi Indonesia kepada luar negeri (imperialisme), yang berakibat dengan sangat tergantungnja pula „kemerdekaan“ politik dari Negara R.I. kepada Negara² imperialis. Karena, sesuatu negara yang tidak menguasai ekonomi tidak pula dapat menguasai politik, sekalipun mampaknja ada „kemerdekaan“ politik itu.

KEMERDEKAAN JANG DIKAT OLEH BERMATJAM: „TALP“.....

Sebagai kenjataan tergantungnja „kemerdekaan“ politik Negara R.I. kepada negara² imperialis yang dipelopori oleh Amerika Serikat, dibuktikan dengan adanya perdjandjian² yang merugikan kepentingan nasional dan merupakan ikatan² yang imperialistis kepada Negara R.I., dalam keadaan mana pemerintah R.I. tidak dapat mempergunakan „kemerdekaan“ politik itu sebagai suatu kekuasaan untuk menentangnya.

Perdjandjian² itu adalah sebagai berikut :

Pertama : Perdjandjian pindjaman Eximbank. Dalam perdjandjian itu disebutkan, bahwa Negara R.I. sebagai Pemindjam, „merdeka“ membuat projek² untuk pembelian barang² keperluan pembangunan negara, tetapi tidak merdeka untuk menentukan projek mana yang barang²nja harus diserahkan lebih dahulu. Ketentuan untuk itu terletak dalam kekuasaan Eximbank (batja imperialis Amerika Serikat). Ini berarti bahwa apa yang harus dibangun lebih dahulu di Indonesia, ditentukan oleh kekuasaan imperialis.

Kedua : Tentang Embargo. Pada hakekatnja Embargo itu adalah suatu siasat perang agressi yang provokatoris dari PBB (batja Amerika Serikat) di Korea untuk melemahkan kedudukan musuh. Karena dalam peperangan di Korea yang tidak dipermauklumkan (undeclared) itu ternyata, bahwa Tentara Republik Demokrasi Rakjat Korea dan Tentara Sukarela Tiongkok tidak sadja dapat mempertahankan kedudukannya, pula dapat mengadakan serangan dan perlawanan yang hebat dan perwira, sekalipun dalam soal persendjataan ada djauh lebih kurang dalam hal kwantiteit (jumlah) maupun kwaliteit (matjam) djika dibandingkan dengan persendjataan tentara PBB.

Sekalipun pada waktu pemungutan suara tentang Embargo

itu wakil Negara R.I. dalam PBB tidak ikut memberikan suaranya, namun dalam pelaksanaannya Negara R.I. harus ikut serta, yang mengakibatkan bertambahnja kesukaran dan kesulitan didalam negeri, jaitu merosotnja harga bahan² „strategis“ dan lain² bahan mentah, karena adanya tekanan dari imperialis Amerika Serikat yang menjadi „single buyer“ (pembeli satu²nja) karena Embargo itu.

Ketiga : Perdjandjian San Francisco. Perdjandjian Perdamaian dengan Djepang yang direntjanakan oleh Amerika Serikat dan didorong kepada bekas musuh-musuh Djepang untuk ditandatanganinja, pada hakekatnja adalah pelaksanaan politik ekspansi imperialis Amerika Serikat dengan tudjuan mempergunakan Djepang sebagai pangkalan militer.

Dengan ikut menanda-tangani perdjandjian tersebut, maka Negara R.I. yang oleh pemerintah Wilopo dinjatakan „bersedia memberikan bantuan untuk kepentingan perdamaian dan suasana kerdja sama yang sehat diantara bangsa²“ yang sangat diperlukan untuk kepentingan pembangunan dalam negeri, telah ikut mempersiapkan peperangan imperialistis.

Ke-empat : Perdjandjian MSA. Perdjandjian pemberian „bantuan“ berdasar atas undang² MSA dari imperialis Amerika Serikat itu pada hakekatnja adalah usaha imperialis Amerika Serikat untuk mendjerumuskan rakjat dari negara-negara yang diberi „bantuan“ itu kedalam peperangan imperialis yang aggressive yang sedang dipersiapkannya untuk kepentingan kelas modal raksasa monopoli yang bertachta di Wall Street.

Sekalipun pemerintah Wilopo menolak perdjandjian MSA itu dan berusaha merobahnja dengan Perdjandjian yang berdasar TCA, tetapi pada hakekatnja perobahan itu tidak akan membawa perobahan dasar dan tudjuan dari pemberian „bantuan“ yang imperialistis itu. Kalau kelas imperialis Amerika Serikat menjetujui tentang perobahan itu, berarti bahwa perobahan itu tidak merugikan tudjuan mereka (persiapan perang dunia).

Itulah sekedar kenjataan² yang membuktikan ke-tidak bebasan Negara R.I. setengah djadjahan dalam menjalankannya „kemerdekaan“ politiknya, kenjataan² mana merupakan tragedie nasional sebagai akibat² yang sewadajarnya dan logis dari politik reformis yang bersifat kapitulasi (menjerah) yang tertjantum dalam Manifest Politik Nopember 1945.

PEMBANGUNAN NASIONAL ATAU MEMPERKOKOH KEDUDUKAN IMPERIALIS.

Keadaan yang menggelisahkan bagian terbesar dari rakjat Indonesia itu oleh golongan dan

orang² tertentu dikatakan karena Rakjat Indonesia, terutama kelas buruh, sama mabok merdeka, dan malas bekerdja; mereka hanya pandai mengadjudkan tuntutan², mengadakan pemogokan-pemogokan dan „main politik“ semata². Dikatakan selanjutnja, bahwa tindakan² seperti tersebut itu adalah bersifat a-nasional, a-sosial, merugikan kepentingan negara dan kepentingan nasional dan mempunjai „tudjuan tertentu“, jaitu mengagalkan usaha pemerintah nasional yang dinamakan „pembangunan nasional untuk mengisi kemerdekaan.“

Dengan melemparkan tuduhan² yang demikian kepada bagian terbesar dari rakjat Indonesia, terutama kelas buruh, maka golongan dan orang² tertentu itu bermaksud menutupi tindakan² imperialistis dari modal raksasa monopoli yang sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Sebenarnya yang menjebabkan adanya kesulitan dan kesukaran dalam perekonomian Negara Indonesia itu adalah karena masuk dikuasainja kehidupan ekonomi oleh modal raksasa monopoli, yang tidak mempunjai tudjuan lain ketjuali menggaruk keuntungan raksasa dan mempersiapkan perang dunia baru, sebagai satu²nja djalan untuk dapat terlepas dari tjengkeraman krisis ekonomi yang mengamuk dalam negara² imperialis.

Karena dalam melaksanakan apa yang dinamakan „pembangunan nasional untuk mengisi kemerdekaan“ senantiasa berhubungan erat dan bekerdja sama dengan negara² imperialis yang terserang krisis ekonomi, maka Negara R.I. telah terseret pula kedalam tjengkeraman krisis itu.

Dengan demikian, maka apa yang dinamakan „pembangunan nasional untuk mengisi kemerdekaan“ itu pada hakekatnja adalah „pembangunan untuk memperkokoh kedudukan sistem imperialisme“ yang sudah berada dalam keadaan krisis umum.

Dalam pelaksanaan usaha „pembangunan yang imperialistis“ itu, maka bagian terbesar dari rakjat Indonesia, terutama kelas buruh, tidak mungkin dapat ikut serta, karena „pembangunan“ itu adalah bertentangan dengan dan merugikan sangat kepada kepentingan nasional.

Djadi adanya tuntutan², pemogokan² yang dijalankan oleh kelas buruh dan „permainan politik“ dari bagian terbesar rakjat Indonesia adalah tindakan² yang bersifat nasional sedjati, revolusioner dan konsekwen anti-imperialis. Karena tindakan² itu adalah bertudjuan untuk mempertahankan kepentingan² rakjat Indonesia terhadap serangan ekonomis yang buas dan mengganas dari modal raksasa monopoli.

Kalau ada „pembangunan nasional“ yang akan digagalkan oleh tindakan² bagian terbesar dari

(Sambungan ke halaman 10)

Sekitar Persoalan Angkatan Perang Kita

„Pertempuran” sengit antara Parlemen dengan Pemerintah (Kem. Pertahanan)

(Dibawah ini kita turunkan isi surat dari Bayangkari Negara dengan maksud agar bagi pembatja kita menjadi jelas apa yang sekarang dipersoalkan dan diperdebatkan didalam Parlemen mengenai Angkatan Perang kita. Sebenarnya yang menjadi pokok „pertempuran” sekarang ini ialah pokok isinya surat Kol. Bambang Supeno yang telah dischors dari jabatannya. Karena menurut pandangan kita, isi surat Bayangkari Negara ini lebih umum, artinya tidak sebagai surat kaleng (seperti halnya setengah orang mentjap suratnya Kol. Bambang Supeno) karena dihadapkan kepada Pemimpin Rakjat dan sudah dibicarakan dalam rapat umum Parlemen (rapat terbuka ke-79) dan tidak pula ditulis oleh orang seorang saja, maka kita hindangkan pula ini kepada pembatja untuk menjadi bahan pertimbangan. Soal angkatan perang adalah soal kita semua, soal seluruh masyarakat dan rakjat kita, bukan soalnya beberapa orang saja, sekalipun pangkat tinggi atau maha tinggi. Red.).

PERIHAL :

Ditempat, tgl. 20-8-1952.

Beleid Kementerian
Pertahanan yang mem-
bahayakan Negara.

K e p a d a
Jth. Saudara? Wakil Rakjat

di
P A R L E M E N.

M e r d e k a.

Saudara-saudara Pemimpin Rakjat yang terhormat.

I. Dibawah ini kami anggauta? Angkatan Perang baik yang berada di pusat maupun di daerah? yang telah tergabung dalam organisasi BAYANGKARI NEGARA dan pembina Djiwa Proklamasi 17-8-45 didalam Angkatan Perang, serta penegak isi maksud U.U.D. Republik Indonesia, setelah kita bersama meninjau keadaan keamanan dewasa ini dan perimbangan penderitaan kita di front serta perhatian Pimpinan Pusat Angkatan Perang dalam arti menentukan beleidnya, kita bersama telah mendapatkan gambaran, bahwa:

II. Gangguan Keamanan selalu tidak pernah mendapat perhatian dan diselesaikan oleh Pimpinan Angkatan Perang (Kementerian Pertahanan) sesuai dengan peninjauan dari Kabinet, walaupun keadaan keamanan adalah menjadi titik berat untuk mendapatkan penyelesaian dengan segala persoalannya guna stabilisasi Negara.

III. Keamanan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengambil suatu dasar dan alasan yang bersifat Sosial-ekonomis, atau dengan kata sebaliknja „Keamanan hanya dapat diselesaikan bila ekonomis kuat”, yang pada hakekatnja pendapat diatas adalah mengandung suatu pengertian sangat luas serta merupakan suatu perputaran pertanyaan yang ta? dapat dijawab karena problem ini atau penyelesaiannya ekonomis adalah menimbulkan pelbagai pendirian dan interpretasi yang akhirnya merupakan lingkaran tiada habisnja.

Begitu pula bila keamanan hanya dilihat dari sudut beleid politis.

IV. DENGAN MEMPERHATIKAN DJUGA UNSUR? POLITIS SERTA EKONOMIS DAN BEBAS DARI ADANJA SEGALA PENGARUH LUAR NEGERI (INI DAPAT DIATASI OLEH KEKUATAN NASIONAL), SERTA PULA SESUDAH KITA MENINDJAU DAN MEMPELADJARI DIDALAM KEMENTERIAN? LAIN, TERNJATA TIDAKLAH LEBIH BESAR PENGARUH BURUKNJA, DARI PADA KEADAAN PERGESERAN DIDALAM KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN ANGKATAN PERANG SEKARANG INI, JANG MEMANG INSTANSI INI PULALAH JANG MEMPUNJAI HAK DALAM MENJELENGGARAKAN BELEID KEAMANAN NEGARA TERHADAP PENGATJAU; MAKA KITA BERPENDAPAT, BAHWA LETAK DARI TIDAK ADANJA PENJELESAIAN DALAM KEAMANAN, JANG SEHINGGA MENJEBABKAN TETAP MENDJADI SUATU SENGKETA DIDALAM KALANGAN POLITISI DAN DJUGA MENIMBULKAN PELBAGAI TJORAK DALAM MEMBAWA TIAP? PERINTAH (SEBAGAI BELEID) ADALAH :

AKIBAT TINDAKAN TIDAK BIDJAKSANA DAN DENGAN SENGADJA DARI BEBERAPA ORANG JANG DUDUK DALAM PUTJUK PIMPINAN ANGKATAN PERANG JANG KINI BERKUASA DAN MEMEGANG TAMPUK PIMPINAN DIDALAM KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN STAF ANGKATAN PERANG, (SDR? HAMENGKU BUWONO, ALI BUDIARDJO DAN T.B. SIMATUPANG).

V. Tindakan tersebut diatas njata semendjak terbentuknja Kabinet Natsir jang sebenarnya Programnja telah djuga menitik beratkan keamanan akan tetapi waktu itu toch tidak terdapat suatu peninjauan dan penyelesaian jang khusus, sebab titik berat dari fikiran Pimpinan A.P. dan Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan, dipusatkan kepada:

- Bagaimana mereka dapat tetap berkuasa dan meluaskan kekuasaannya;
- Karena ada suara dan peninjauan khusus harus diadakannya kedudukan Panglima Besar;
- Dan berpusat untuk menstabilisasikan Misi Militer Blanda (M.M.B.), serta pula memberikan kedudukan pasti pada bekas-bekas KNIL dalam A.P.R.I. jang mungkin mereka akan dijadikan kernleger.

VI. Begitu pula pada saat Kabinet Sukiman/Suwirjo memegang tampuk pimpinan pemerintahan dan dsr. Sewaka sebagai Menteri Pertahanan, pengluasan kekuasaan dapat berdjalan terus dengan diadakannya pergeseran organisasi Kementerian Pertahanan dgn. pokok maksud guna mengurangi kekuasaan Menteri Pertahanan, tetapi pengluasan kekuasaan Sekretaris Djendralnja dan K.S.A.P.

Menteri Pertahanan dulu bertanggung djawab militer politis dan militer strategis, tetapi sekarang hanya merupakan politike figur saja.

Pengluasan kekuasaan Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan dan K.S.A.P. serta pergeseran organisasi Kementerian Pertahanan di djalankan dan dipaksakannya terus, meskipun tindakan ini tidak didasarkan atas U.U.D. dan peraturan Pemerintah dan menimbulkan banjak kegelisahan para pegawai-pegawai tinggi A.P. baik didalam maupun diluar Kementerian Pertahanan.

VII. Dengan pergeseran organisasi jang tidak dapat dipertanggung djawabkan ini, diselenggarakan pula penempatan perseorangan jang mau mengikuti djedjak pergeseran ini untuk melajani kepentingan mereka, (sebagai alat pengluasan kekuasaannya) sehingga timbul dalam penempatan orang-orang ini, suatu perimbangan golongan jang tidak mempunjai suatu imbalan dan peninjauan luas berdasarkan kebenaran.

VIII. Telah berhatilnja pengetjilan kekuasaan Menteri dan diperluasnya kekuasaan

Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan, diadakan suatu tindakan jang dihususkan oleh Sdr. Ali Budihardjo guna mendapatkan keuntungan uang dengan pemusatan keuangan, pembelian alat-alat Angkatan Perang, penentuan tempat pembelian dan orang? jang menjelenggarakan pembelian;

Umpamanya jang achir? ini saja ferdjadi:

- Pembelian telah dilakukan oleh Sdr. Sudarpo dan Sdr. Wibowo, kedua-duanya anggauta P.S.I., dengan tidak melalui procedure jg. harus ditempuh (melalui Staf A dulu);
- Terdjadinja konflik antara Duta kita di Belgie dengan Sekr. Djenderal Kementerian Pertahanan akibat ditolaknja perdjandjian oleh Sekr. Djen. Kem. Pertahanan, karena tidak menguntungkan orang-orang P.S.I. dan atau Skr. Djen.;
- Soal kepintjangan dalam masalah administrasi pembelian djelas dapat dirasakan pula oleh Commodore Suryadarma;
- Masih banjak soal lain?nja jang merugikan Negara tetapi menguntungkan P.S.I. dalam menggunakan keuangan Negara.

IX. Hasil dari pengluasan kekuasaan K.S.A.P. dipergunakan pula oleh Sdr. Simatupang untuk antara lain;

- Mengadakan tekanan terhadap Formateur Sidik/Prawoto sewaktu oleh P.N.I. ditjalonkanja Sdr. Kol. Bambang Sugeng untuk menduduki kursi Menteri Pertahanan dengan Nota keras dan tebal;
- Atas perbawanja sebagai K.S.A.P. selalu mengadakan tekanan terhadap konsepsi formateur kabinet dan selalu mempengaruhi saran pembentukan Kabinet;
- Ikut mengeluarkan suara? jang negatief terhadap Kabinet Sukiman/Suwirjo pada saatnja Kabinet tsb. masih berkuasa dan dia

sebagai pemegang alat kekuasaan Negara;

- Sering pula mengadakan tekanan-tekanan kepada Sdr. Presiden;
- Dan suara-suara edjeikan kepada Pemuka-pemuka Islam Indonesia.

X. Tindakan pemusatan kekuasaan serta pengluasannya tersebut diatas, menundjukkan adanya sesuatu konsolidasi dari salah satu golongan masyarakat besar jang akan mempergunakan keuangan dan kekuasaan Angkatan Perang guna kepentingannya.

Perhatian.

- Bahwasanja ada suatu proses konsolidasi tenaga dan kekuatan jang dilakukan oleh tiap-tiap partai untuk menghadapi pemilihan umum dan constituante adalah suatu sjarat mutlak untuk memperoleh kemenangan atas dasar-dasar demokrasi;
- Salah satu putusan Rahasia dari kongres P.S.I. di Bandung, adalah diharuskannya bagi tiap-tiap anggautanja, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknja dari saluran Angkatan Perang guna menghadapi pemilihan umum dan constituante.

XI. Akibat dari adanya pemusatan fikiran dan tenaga oleh orang-orang tersebut diatas, untuk memperoleh kekuasaan dan keuangan sebesar-besarnya dalam A.P. terdjadilah sesuatu kepintjangan dalam menghadapi soal keamanan atau dengan perkataan lain penyelesaian keamanan tidak dititik beratkan, sebagai bukti:

- Djawa-Barat sampai kini belum dapat diselesaikan walaupun sesudah adanya koordinasi tehnik dari alat? pemerintahan untuk menghadapnja, malahan sekarang fihak gerombolan jg. memegang tjap? iniatief vuurcontact (pertempuran).
- Sulawesi Selatan hingga kini tidak mendapatkan

(Sambungan ke halaman 5)

N.V. PUDJA
DJALAN NUSANTARA 18A — DJAKARTA-RAJA

Importir Tunggal untuk bermatjam-matjam barang.
Tjarilah hubungan dari sekarang.

Tentu memuaskan!

(Sambungan dari hal. 4)

penyelesaian baik, meskipun pelbagai djalan-beleid telah diambil oleh Kabinet, Parlemen dan daerah. (Pada waktu Kol. Kawilarang memegang Pimpinan di Sulawesi djalan kekerasan diambilnya sebagai tindakan mutlak dan sekarang Kol. Gatot Subroto mengambil atjara beleid penyelesaian atas dasar perundingan, pun tidak dapat penyelesaian umum dari atas);

c. Kurang adanya perhatian terhadap beleid Panglima daerah dalam arti penyelesaian keamanan tidak hanya menghadapi pengatjauan (setjara Militer atau Politik) oleh Panglima, tetapi menimbulkan djuga perasaan bagi para peradjurit bawah (Kompi Cdt. kebawah) dalam mengambil tindakan, hingga perkataan tindakan keras dan tegas dari Putjuk Pimpinan A.P. atau Menteri Pertahanan dalam kenjataanja tidak ada (tindakan sekarang di daerah setengah2).

d. Adanya pertengahan didalam A.P. pun tidak dapat perhatian dan penyelesaian berdasarkan kebenaran, padahal seharusnya tiap2 perpejahan dalam Pimpinan A.P. harus diatasi dgn. djudjur hingga mendapatkan kebulatan tekad dan pendapat dalam menghadapi problem yang membahayakan Negara.

(Misi Militer Belanda dan soal keamanan).

Adalah suatu kenjataan ketidakadilan dari beleid golongan tersebut yang hanya mementingkan sendiri, salah satu umpama:

1. Peristiwa Kol. Bambang Supeno adalah suatu kenjataan ketidakadilan dari beleid golongan tersebut, sebab mereka tidak menyelesaikan musababnja yang sampai mengharuskan terdjadinja peristiwa Kol. Bambang Supeno berbuat demikian.

Mereka menyelesaikan hanya akibatnja, meskipun alasan atau musababnja peristiwa tersebut lebih membahayakan bagi keselamatan Rakjat dan Negara; oleh karena penyelesaian setjara yang dibuat mereka, dapat menguntungkan golongan mereka. (pengluasan kekuasaan).

2. Soal adanya kegontjangan didalam Angkatan Laut antara golongan S.P.T.-ers yang sedjak proklamasi ikut memperdjoungkan Kemerdekaan dgn. bekas K.M.-ers yang masuknja kedalam Angkatan Laut akibat persetudjuan K.M.B.

e. Bukti-bukti perumpaan tsb. diatas atau dibawah ini semua memang sengadja tidak dibuat sedjelas-djelasnja sebagaimana seharusnya

merupakan proses-perbal, dan sebagaimana kita terima lengkap lapurannja dari anggauta2 Bayangkari Negara baik yang dari pusat maupun yang dari daerah, karena mengingat keadaan waktu dan kita anggap sudah tjukup djelas djika untuk mengambil tindakan parlementer maupun politis.

XII. Kesemuannya itu telah djelas bagi kita, bahwa semua tindakan2 serta keputusan2 yang dilakukan atau diambilnja mempunyai suatu dasar politis, dengan penindjauan pada sjarat, harus memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Umum dan konstituante. (pengluasan kekuasaan-pemutusan keuangan-penempatan orang2nja didalam rangka organisasi yang berkuasa-perdjoangan party) meskipun kepentingan Negara dan Rakjat terbengkalai adanya, dan

XIII. Keadaan sekarang didalam Kementerian Pertahanan, didjadikan arena pergulatan pertama dari sifat watak perdjoangan party dalam djangka djauh untuk mendapatkan kemenangan dalam alat kekuasaan Negara, Parlemen dan Kabinet, sesudah atau sebelum Pemilihan Umum dan konstituante, walaupun dgn. bekunja alat kekuasaan Negara dalam keadaan sekarang merugikan Rakjat dan Negara. (pengganggu keamanan bebas bergerak).

XIV. Tindakan sematjam tersebut diatas oleh pemegang kekuasaan dan tampuk pimpinan ditambah dgn. pengaruh Negara Luar sangat menekan djalannja politik pemerintahan dan Negara, serta kekuatan2 yang menentang kepentingan nasional, (Westerling, Apra, Bos, RMS. dan lain-lainnja) keamanan tidak dapat diselesaikan dan stabilisasi Negara serta masyarakat ta' dapat terdjamin, malah sangat mungkin menimbulkan keruntuhan Negara Republik Indonesia.

XV. a. ADANJA PERGULATAN DAN DIADAKANNJA PERGESERAN KEKUASAAN OLEH SEGOLONGAN DARI MASJARAKAT BESAR DARI LUAR ANGKATAN PERANG UNTUK TUDJUAN TERTENTU JANG DENGAN MEMPERGUNAKAN BEBERAPA EXPONENJA DIDALAM KEMENTERIAN PERTAHANAN, PADA HAKEKATNJA TELAH DIKETAHUI OLEH PEMERINTAH SEMENDJAK KABINET NATSIR, TETAPI SEDJAK ITU HINGGA SEKARANG ENTAH TAKUT, ATAU BIMBANG ATAU ENGGAN TETAPI JANG NJATA SEKARANG, PENGLUASAN KEKUASAAN DIDALAM ALAT KEKUASAAN NEGARA OIEH SALAH SATU PARTY BERDJALAN DENGAN LANTJAR DAN OLEH KABINET TIDAK ADA KEPUTUSAN UNTUK MEMBERSKANNJA; MAKA

b. untuk mendjaga djangan sampai digunakannja alat kekuasaan Negara kepada singgasaanja (Negara dan Pemerintah), adalah suatu kejakinan dan kebulatan tekad dari kita, harus adanya tindakan setjara njata dari sdr.2 Wakil Rakjat yang menerima surat kami ini terhadap personalia di Putjuk Pimpinan A.P. yang tidak memenuhi sjaratnja dan menjabarkan berdjalannja proses kearah keruntuhan Negara.

c. dan karena itu pula maka keputusan dan hasil pemahaman kita tidak lagi kita berikan kepada Pemerintah tetapi persoalannya masih kita pertjajakan kepada Pemimpin2 Rakjat yang djadi Pembela Kebenaran.

XVI. a. Bila tindakan itu tidak dilaksanakan oleh sdr.2 dari Pemimpin2 Rakjat pembela dan pembina kebenaran sebagai salah satu harapan penghabisan kita ambil tindakan setjara politis atau parlementer, maka kita anggap bahwa saudara-saudara sekalian (Parlemen) telah membenarkan adanya tindakan bebas dari ikatan hukum guna menegakkan hukum atau mengembalikan gezag kepada singgasaanja dan berarti akan timbul suatu tindakan yg. menjedihkan;

b. perlu djuga kami djelaskan kepada sdr.2 sekalian, bahwa musababnja kami hanya membuat surat ini bukankah sekali2 karena kita sekarang djuga tidak dapat mengembalikan tata-pengatur kepada singgasaanja, tetapi oleh karena kami masih memper-tjajai adanya saluran hukum.

XVII. a. Oleh karena itu dalam saudara2 sekalian mengambil tindakan terhadap persoalan tersebut diatas semestinja berperdjoungkan kebenaran sehingga tak perlulah takut kepada adanya

kekuatan dibelakang mereka yang sebenarnya memang tidak ada;

b. Djanganlah saudara2 dalam menindjau Angkatan Perang atas dasar suara, dan bahwa yang memegang Pimpinan A.P. berarti mempunyai pengikut dan suara banjak.

Dasar perhitungan sematjam itu, saudara2 hanya akan mendapatkan gambaran yang salah. Sebab Angkatan Perang adalah terikat dalam hierarchie dan discipline.

XVIII. Dalam saudara2 menindjau serta mendapatkan suatu gambaran yang terang mengenai kedudukan personalia dalam Putjuk Pimpinan A.P. adalah harus ditindjau dalam djangka yang djauh.

Dikala keadaan dunia memuntjaknja dalam sengketa antara dua negara besar yang pasti menimbulkan perang, yang pula dapat mengakibatkan kegontjangan disekitar kita maka diatasi dan dihadapi oleh kita suasana keadaan sematjam itu oleh kekuatan yang bulat dan disebut pertahanan Rakjat Total, yang djuga didjadikannja suatu U.U. dalam rangka U.U. Pertahanan. Dimana perseorangan Pimpinan A.P. pada masa sekarang ini dalam fikirannya menganggap dirinja adalah Pemimpin Rakjat, sedangkan perbawanja adalah lepas dari kedudukan keadaan masyarakat besar yang sebenarnya dan djauh dari pada Rakjat.

Tak akan mungkin mereka dapat melaksanakan dasar dan gerakan Pertahanan Rakjat Total. Serta pula dalam kenjataanja sangat mereka mengikuti petunjuk dan djedjak dari kekuatan2 pindjaman (M.M.B.), yang hingga kini sudah djelas banjak merugikan kepentingan nasional. Dengan kedudukan

demikian timbullah dalam diri kita sjakwasangka dan khawatir, tentang adanya djaminan terselenggaranja Pertahanan Rakjat Total.

XIX. Demikianlah gambaran dan hasil pertemuan kita pada tg. 20-8-1952 di Territorium IV.

XX. TJATATAN:

Meskipun kita telah mengetahui, bahwa atjara Parlemen hanya akan membitjarakan tiap soal dengan seksama, bilamana kedudukan persoalan ini adalah terang dan datangnya melalui saluran yang terang pula dalam penerimaannya, toch atjara sedemikian tidak kita lalui, berkenaan dengan waktu yang tidak mengizinkanja, untuk menjabutkan tiap-tiap nama pada kita dengan djelas baik yang dari pusat maupun dari daerah.

BAYANGKARI NEGARA

tertanda

1. Pa Kementerian Pertahanan A.D. 7 BDL
A.L. 2 „EM
A.U. 2 „FN
2. Pa Terr. II. 1 „KD
3. Pa Terr. III. 1 „RS
4. Pa Terr. IV. 2 „GP
5. Pa Terr. V. 3 „YR
6. Pa Terr. VI. 1 „WV
7. Pa Terr. VII. 2 „ZX.

**

Tjataan Red.:

Dalam rapat terbuka Parlemen, Subadio Sastrosatomo, ketua fraksi P.S.I., telah membantah tuduhan yang mengatakan bahwa Mr. Ali Budiardjo, Sultan Hamengku Buwono dan T.B. Simatupang adalah mendjadi anggota Partai Sosialis Indonesia. Katanja, tidak satupun dari ketiga orang itu mendjadi anggota P.S.I.

INGIN MENGETAHUI ?

PESAN SEKARANG !

PERDJUANGAN DAN PELAKSANAAN KEMERDEKAAN NEGARA DAN RAJAT, DITERANGKAN DENGAN DJELAS DAN MUDAH DIDALAM BUKU: MELIHAT :

TIONGKOK BARU

NEGARA MERDEKA
PANDAI MERDEKA,
SANGGUP MERDEKA !

Perbandingan bagi orang tua dan peladjaran bagi orang muda, Tiap-tiap orang yang ingin melihat berhasilnja perdjoungkan bangsanja, perlu membatja buku ini.

Oleh: BARIOEN A.S. (Anggota delegasi ke Peking)

Kertas baik, dihiasi gambar, tebal 133 halaman sedang harga tjuma Rp. 12.—

Lampiran :

1. Statement Delegasi Indonesia.
2. Undang-Undang Agraria R.R.T.

Beli banjak dapat potongan bertingkat-tingkat.

Pesanan dari 1—5 buku ongkos kirim vrij.

Pengiriman hanya dilakukan sesudah terima uangnya.

PENERBIT „RADA“

Djalan Teuku Umar 25
DJAKARTA.

Bukan djandji . . . Tapi . . . Tjita-tjita

Sebagai djawaban kepada tulisan kami, „DISEBERANG DJEMBATAN EMAS” mengenai djandji Pemimpin² kita, termuat dalam M.K. No. 5 tg. 13-9-52 terdengar SUARA BARU sebagai berikut :

„Saja tidak memberi djandji kepada rakjat, bahwa saja akan memberikan kemakmuran kepada rakjat, tapi rakjat sendiri jang harus membangun kemakmuran itu untuk seluruh rakjat Indonesia. Allah pun tak akan memberikan kemakmuran kepada manusia, sebagai djatuhnja hudjan dari langit, tapi manusia sendiri jang harus berusaha mengubah nasibnja (kemakmuran) dengan tangannja”.

HIP HIP HIP „HURA”!!!
Sorak rakjat djelata.

Tidak sembarang orang bisa djadi Pemimpin dan bukan sembarang orang pula bisa diangkat sebagai Pemimpin, mereka harus mendapat keper-tajaan dari rakjatnja. Bahagialah seorang Pemimpin jang betul² bersembajan : „SEPI ING PAMRIH, RAME ING GAWE”. Sebab itulah seseorang Pemimpin jang bertjita-tjita jang sudah ditaati oleh rakjatnja, ia harus sanggup memimpin kedjurusan tjita² itu dengan tak memisahkan diri sekedjap mata, tak mundur setapak dan berani atau bisa mewujudkan tjita²nja itu.

Seorang Insinjur jang membikin ontwerptekening untuk sesuatu bangunan akan sanggup mewujudkan gambarannja, walaupun ia sendiri tidak akan mendjadi tukang batu, tukang aduk, tukang gotong alat², tapi si Insinjur sendiri berani mewujudkan bangunan jang sudah tergambar itu, bukan ia lari meninggalkan bangunannja, karena dilihat bangunan baru itu akan ambruk.

Walaupun kemakmuran rakjat adalah tjita² Pemimpin, tapi bukan seharusnja, si Pemimpin meninggalkan rakjatnja, menjerahkan terwujudnja tjita² pada sikap „MASA BODO” rakjat, untuk melemparkan tanggung djawab diri si Pemimpin. Tidakkah sepatannja, bila sang Pemimpin jang mengetahui, gagalnja tjita², lalu berani membikin koreksi, sehingga ketahuan sebabnja keagalannja sesuatu tjita², bukan bermain pokrol bambu, jang merasa kalah dalam membela sesuatu perkara.

GAGALNJA TJITA² KEMAKMURAN RAKJAT.

Kami tetap mengatakan, bahwa rakjat dalam hal tjita² kemakmuran jang belum atau tak akan bisa diwujudkan, BUKAN SALAHNJA RAKJAT, karena tidak mau menjapainja, tidak mau mengubah nasibnja, tidak mau berusaha. Hal ini bisa ditanja-

kan kepada rakjat, bahwa mereka memang sudah lama ingin makmur, tapi mereka tak tahu djalannja, mana jang harus ditempuh, dalam hal ini, PEMIMPINLAH JG. HARUS MENDJADI PELOPOR, DJADI PENUNDJUK DJALAN, agar rakjatnja djangan kesasar ketempat NJAI BLO-RONG jang siap akan menelan mereka.

Menurut hemat kami, sepanjang jang kami ketahui tiap hari dan dalam mengikuti gerak langkah masjarakat, maka GAGALNJA TJITA² tentang kemakmuran rakjat, adalah sebagai berikut :

1. Misih dipakainja sistem EKONOMI LIBERAL, jg. membolehkan orang menumpuk harta benda, membiarkan MODAL RAKSA-SA meradjalesa di Indonesia dan pula membiarkan tjara pengisapan rezeki Indonesia untuk keperluan orang asing dan luar negeri.
2. Tjara pedjuangan perebutan rezeki dengan sembojan SIAPA TJEPAT TENTU DAPAT, SIAPA KUAT MESTI MENANG, membikin tenaga ekonomi bangsa Indonesia hampir habis napasnja kalau tidak akan mampus sama sekali.
3. Si Pemimpin jang bertjita-tjita terlalu djauh dari rakjatnja, karena terpisah oleh tembok besar jang menghalang-halainja, sehingga ia tak bisa leluasa memimpin kearah jang dituju dan ditjita-tjitakan.
4. Jang paling menjedihkan, ialah si Pemimpin dikerumuni oleh pembantu²nja jang bukan „KADER”-nja sendiri jang mempunyai rasa senasib, sepaham dan sepenanggungan.
5. Tjita-tjita si Pemimpin, ibarat rentjana bangunan Gedung Indonesia, tidak dikerdjakan oleh ANNE-MER INDONESIA, tapi pekerjaan itu diserahkan kepada pemborong luar Negeri, ialah ANNEMER K.M.B., sehingga sudah sewadjaranja, bila pemborong asing ini, akan berusaha menjari untung sebanjak-banjaknja, walaupun menindas tukang² batu, tukang aduk, segala matjam tukang dan sebagainja. Sudah barang tentu si pemborong Asing ini, akan memakai tenaga² kuli, werkbaas dan lain², jang dipandang baik baginja karena bisa memberi untung banjak.
6. Rakjat sudah tak berdaja, tak ada kekuatan untuk menjampaikan maksud dan keinginan hatinja, mereka butuh kenderaan, butuh bimbingan, butuh tuntunan, jang paling penting butuh bantuan MODAL PERTAMA (stootkapitaal).

TJENDERANJA TJITA².

Tjita² Pemimpin, bukan saja djhusus jang djadi monopolinja si Pemimpin, tapi telah dipahami oleh para sardjana, sebelum lahirnja para Pemimpin. Negara jang ditjita-tjitakan oleh para Pemimpin, kemakmuran jang mendjadi idam-idaman para Pemimpin, sebagai jang diutjapkan pula oleh para KI DALANG di belakang kelir, tentang KEA-GUNGANNJA NEGARA NDOROWATI, demikian bunjinja :

„NEGARA PANDJANG APUNDJUNG, PASIR WUKIR, GEMAH RIPAH LOH DJINAWI, KERTO RAHARDJO, TULUS KANG SARWO TINANDUR, BEBEK SAPI AJAM BALI ING KANDANGE DATAN GINIRING, BARANG GEMLETAK DATANA SING NJOLONG, PARA KAWULA WEDI ASIH, KENERINGAN ING PRADJAKANAN KERING, PARA RADJA LIJA NEGARA TELUK DATANG GINEPUK, SAKA KAWIBAWAN LAN ADILE RATU ING NDOROWATI”.

(Negara pandjang dan agung, mempunyai pelabuhan dan gunung², makmur subur tanahnja, tata dan tenteram, djadi segala apa jang ditanam, itik lembu dan ajam pulang kandang tidak dengan digiring, barang² jang terletak dimana sadja tidak ditjuri orang, rakjat takut tapi taat, dihormati oleh Negara Asing, para Kepala Negara Asing tunduk dengan maunja sendiri, dari daja perbawa dan adilnja Kepala Negara NDorowati).

Para Pemimpin mentjita²kan suatu Negara jang mempunyai keagungan seperti Negara Dorowati, kemakmuran, ketenteraman dan keamanan, keselamatan, keadilan, kedjurdjan, keramaian, kekuatan Negara dan sebagainja seperti gambaran Negara Dorowati. Negara sematjam itu, kirannja tak akan ada manusia dikolong langit ini, jang tidak mentjintai atau menghendakinja.

Setelah kita mengetahui, bahwa para Pemimpin bertjita-tjita satu Negara jang bermasjarakat adil dan makmur seperti diatas, sedang kita ketahui Negara Republik Indonesia sekarang ini, banjak hal² jang sungsang balik, artinja apa jang ada dibumi Indonesia sekarang ini, adalah sebaliknja dari apa jang ada di Dorowati, maka kewadajiban para Pemimpin harus melaksanakan dgn. kekuatan tangannja, KANG RAWE-RAWE RANTAS KANG MALANG-MALANG PUTUNG, setjara radikal, memakai SIKAT KAWAT, untuk menjikat sebersih-bersihnja, segala borok² masjarakat, memberi karbol kepada baksil² masjarakat, memotong betul² masjarakat, tidak memandang bulu dan pangkatnja.

Lagu „BUKAN SAJA” adalah lagu lama, jang sering dipakai oleh pendjadjah Belanda, untuk menghindari tanggung djawab pemimpin, bila rakjat menggugat. Sikap dan tekad Pemimpin Mesir adalah satu tjontoh bagi Indonesia, rakjat ingin tahu, apa sikap Mesir mendjadi sikap Indonesia, tapi sudah tentu akan datang djawaban dari para Pemimpin, mengatakan bahwa MESIR BUKAN INDONESIA. Bila ada djawaban demikian, rakjat pun akan mendjawab, bahwa mereka pun tahu, jang Mesir bukan Indonesia, tapi perdjungan rakjat mesir, serupa dan sedjalan dengan rakjat Indonesia.

TAK GUNA KITA MERDEKA, DJIKA RAKJAT TETAP DJEMBEL.

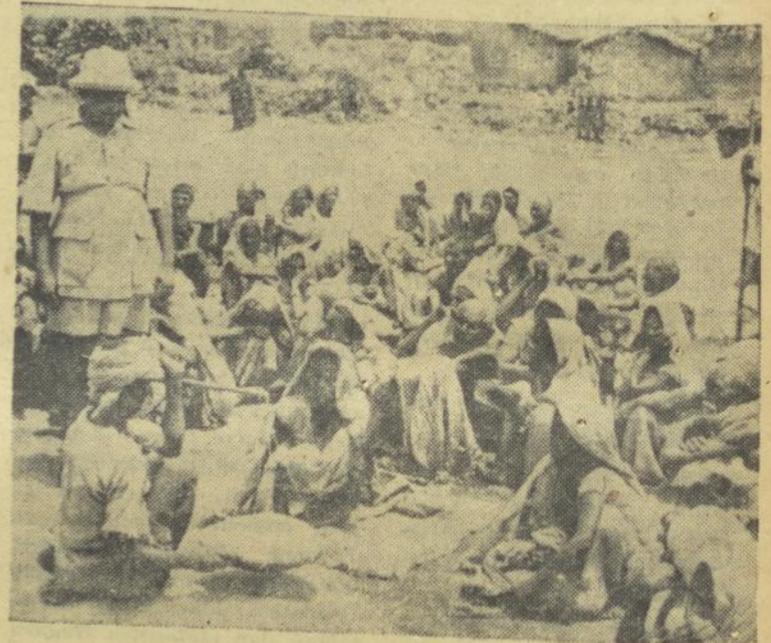
Beberapa Pemimpin telah tegas dalam utjapannja, sehingga telah terdengar suara Pemimpin, bahwa bilamana Negara jang kita bangunkan ini, tidak mendjamin hidup lajak bagi 80 djuta rakjat Indo-

nesia, djika rakjat Indonesia setelah merdeka ini, masih tetap djembel, sudah ada Pemimpin jang bilang, bahwa Negara Merdeka ini, TIDAK ADA GUNANJA.

Semoga utjapan para Pemimpin demikian, bukan utjapan omong kosong, tapi utjapan jang diikuti oleh perbuatan, sehingga akan ada tindakan, KETJUALI „MEMBANGUN” KULIT NEGARA, MEMBANGUN ISI PEREKONOMIAN RAKJAT, PUN DISERTAI SIKAT KAWAT, karbolan dan creolin, untuk memberantas segala apa jang buruk dan menghalangi kemaedian Negara. Sampai bumi Indonesia kiamat, tak akan kemakmuran rakjat datang, bilamana parasit dan kumara masjarakat, tetap dibiarkan tumbuh meradjalesa dengan suburnja.

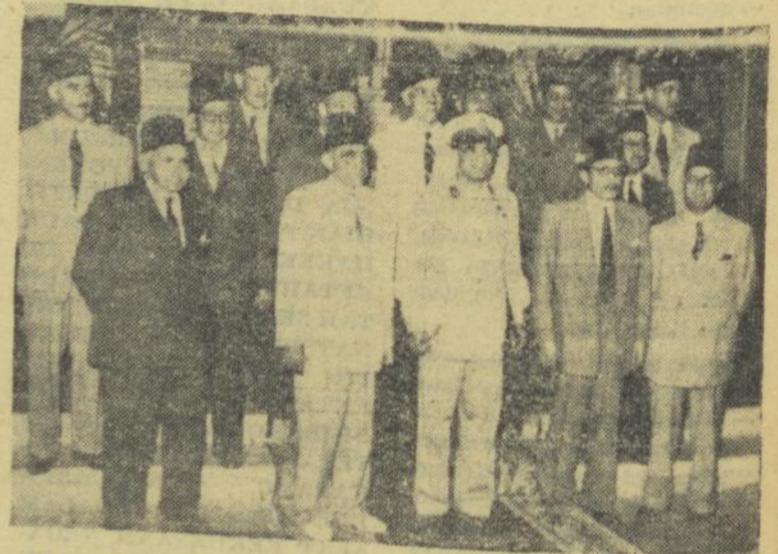
Memberi obat bius, obat tidur kepada rakjat, sungguh berbahaja. Kawan pedjuang, mengertilah maksud kami !!!!!

(Generasi Baru).



India sudah merdeka seperti Indonesia. Sungguhpun begitu bahaja kelaparan jang mengantjam djutaan rakjat tidak habis²nja. Lebih hebat dari di Indonesia lagi.

Gambar diatas memundjukkan pembagian beras dengan pertjuma, tindakan jang harus tjepat² dilakukan Pemerintah untuk menolong njawa rakjatnja.



Inilah Kabinet Nadjib dari Mesir jang telah dapat memimpin dan menjelamatkan revolusi Mesir dengan melakukan pembersihan disegala lapangan, memainkan sapu djagad jang tidak pandang muka, bulu, golongan dan partai. Ditengah² berdiri pahlawan Mesir Baru itu (pakai uniform).

(Klise Sin Pa).

Menjambut ulang tahun ke III R.R.T.

Republik Rakjat Tiongkok satu Benteng Perdamaian.

Oleh : Wagiman A.A.

Satu Oktober adalah hari yang mempunyai arti yang sangat besar bagi Rakjat yang masih tertindas diseluruh dunia, dan salah satu hari yang menentukan dalam sedjarah Tiongkok umumnya sedjarah dunia.

Detik 1 Oktober 1952 genaplah tiga tahun berdirinya Republik Rakjat Tiongkok, didalam tiga tahun itu Rakjat Tiongkok berjuang terus dan dapat membuktikan kesanggupannya mengatur Negara-

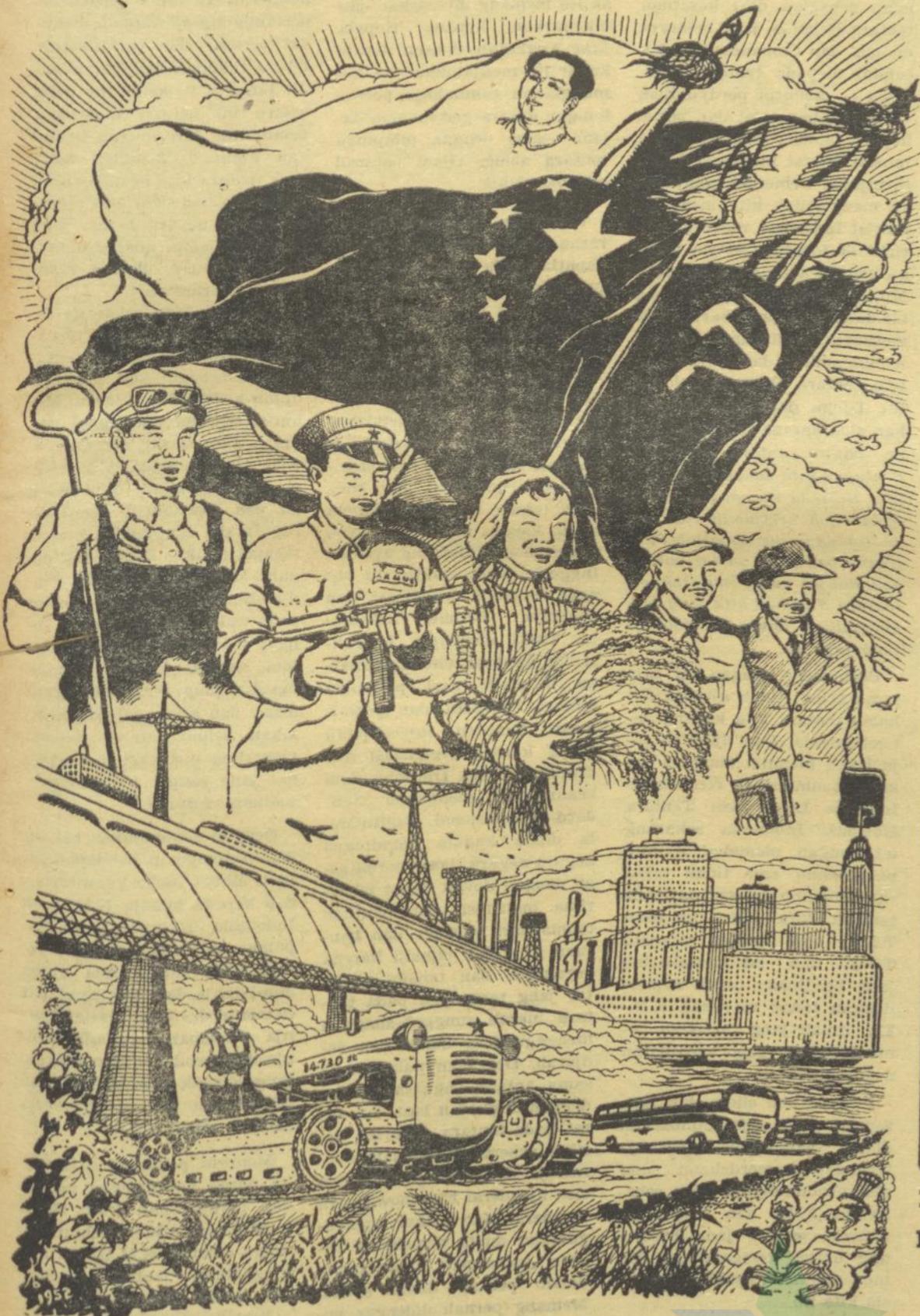
nja kepada dunia, dan banjak memberikan pelajaran-pelajaran bagi kita di Indonesia, terutama dalam soal mempersatukan tenaga nasional.

Kemenangan Rakjat Tiongkok yang gilang gemilang adalah bukti kebenaran dari teori Marxisme, dalam menyelamatkan kaum buruh dengan Rakjat tertindas dalam perjuangannya yang revolusioner melawan Imperialisme.

Seterusnya tidak dapat di-

sangkal lagi bahwa hanja dengan pimpinan kaum buruhlah, revolusi nasional dapat dimenangkan.

Disamping Rakjat Tiongkok menghadapi pembangunan nasionalnya yang begitu hebat, dan menghadapi persiapan perangnya yang direntjanakan oleh Imperialis, maka Rakjat Tiongkok sanggup menunjukkan ketabahan dan keunggulannya sehingga terwujudlah Konperensi Per-



Dahulu dan sekarang

Setelah 3 tahun berdiri Republik Rakjat Tiongkok!
Satu-satunya negara di Asia, yang dahulu diperbudak dan sekarang merdeka
yang sanggup menutup pintu negerinya serapat-rapatnya sampai selamat dan terpeliharalah rakjat Tiongkok sekarang dari tjengkeraman dan terkaman kaum imperialis yang buas dan kedjam.

Berbahagialah rakjat yang sanggup dan berani mentjipta, untuk membebaskan diri!

(Klise „Sunday Courier”)

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

damaian untuk Asia yang diselenggarakan di Peking sekarang ini.

Satu bukti kesetiaan lagi dari perjuangannya Rakjat Tiongkok menghadapi bahaya perang yang mengantjam dunia disaat ini.

Bebasnja Rakjat Tiongkok dari tjengkeraman kaum Imperialis, berarti tambah kuatnja Benteng Perdamaian di Asia.

Hidup, Kawan Mao Tse Tung!

Hidup, Rakjat Tiongkok!

Hidup, Rakjat Indonesia!

Hidup, Revolusi Nasional!

Tandjung Pura, 30 Sept. '52.

RALAT.

Dalam Menara Kita nomor jang lalu, hal. 6-7, ada kedaratan salah susunan dalam keterangan gambar karikatur mengenai tambang minjak Sumatera Utara, baris jang kedua. Jang diudjung mestinja ditarok dipangkal, sehingga bunjinja sbb.:

Mr. Jusuf Wibisono: „Haram nasionalisasi tambang minjak Sumatera Utara. Menurut hukum harus kembali pada B.P.M.”

Hiduplah „negara-hukum”
à la - Jusuf Wibisono ini!

Sampaikan salamku, kepada kawan tertawan.

Oleh : Sansudyar.

Walaupun aku telah berkalang tanah tulang lapuk djasad berhamburan namun sukmaiku tetap mendjelma mengintai kawan jang sedang ditawan.

Sangkar tempat kawanku meringkuk bukan sangkar buatan asli hanja sangkar tjiptaan sahadja beta mengerti, hanja duga razzia belaka.

Memang, banjak tidak 'kan kurang kawan jang tidak ku-akui kawan Umpamakan memelam dalam setangkai sebuah dua, terdapat jang ulatan.

Tapi, kawan! aku sudah djauh sungguh aku mengetahui akan dikau. Djangan chawatir, aku selalu menatap membela, agar terus perjuangannya.

Aku yakin kau korban terkena fitnah walaupun 1000 tahun sekalipun kau meringkuk tak 'kan padam tjita-tjita mu! aku selalu mengiringi, bersedia disampingmu.

Aku tahu, tudjuannya sungguh murni pembela nusa dan bangsa sedjati. Agar bangsamu bebas dari pemerasaan lepas dari segala tindasan.

Engkau, bukan penipu, bukan penghianat bukan koruptor, bukan pembunuh dan bukan perampok atau penjamun. tapi pembela tanah air dan rakjat jang masih terhina.

Karena kedjudjuannya, kawan! kau telah tertangkap dengan fitnahan. Pasti! perbawa-pradja akan menuntut melepaskan engkau kembali ditengah² rakjat.

Andjuranku, pintamu, kembali pada Ibu Pertiwi!

Djakarta, 21 September 1952.

Pabrik klisé SIN PO

Pekerjaan rapi dan tjepat
Harga murah.

Satu-nja jang terkenal di
Ibu Kota.

Asemka 29-30, Djakarta Kota.

Til. 529 Kota

Berlangganan dengan
„Menara Kita”

Berarti turut menghidupkan terus semangat dan njala perjuangannya Negara dan Rakjat Indonesia jang tak kundjung padam dan tak boleh padam.

Adanja Missi Militer Belanda sangat membahayakan.

Kutipan dari pidato Mr. Mohd. Yamin dalam rapat terbuka Parlemen.

Adapun Misi Militer Belanda itu ialah pelaksanaan kerdja-sama dilapangan perhanan sebagai tudjuan dari pada Uni Indonesia - Belanda menurut fasal- 2 dan 21 Uni statuu. Dan dasarnja Misi Militer Belanda itu dirantjangan menurut surat per-setudjuan segi tiga antara delegasi Republik Indonesia, delegasi B.F.O. dan Belanda tertanggal 2 Nopember 1949 No. 11/E.L. Barulah setelah selesai pengubahan susunan K.N.I.L. dan pemulangan kembali Angkatan Udara dan Darat ke negeri Belanda, peraturan Misi Militer Belanda itu berlaku, jaitu sedjak tanggal 29 Nopember 1950. Per-setudjuan Misi Militer Belanda tanggal 29 Nopember 1950 itu tidaklah pernah dikuatkan atau diratificeer oleh Parlemen Indonesia, walaupun konsepnja memang diperkenankan kepada rapat Komite Nasional Indonesia Pusat yang paling achir di Djokja dahulu. Konsep itu terbagi atas 29 fasal, sedangkan per-setudjuan Misi Militer Belanda yang kini berlaku dan tidak diratificeer itu terbagi atas fasal 2 ditetapkan, bahwa per-setudjuan Misi Militer Belanda itu diadakan untuk masa 3 tahun lamanja dihitung mulai 1 Djanuari 1951. Djadi pendirian Pemerintah itu sesuai dengan per-setudjuan Misi Militer Belanda fasal 2 yang tidak atau belum diratificeer itu. Selanjutnja pendirian Pemerintah, bahwa Misi Militer Belanda itu diperlukan sampai 1954 itu adalah satu pemandangan berisi pendirian Militair technisch yang selanjutnja harus pula mendapat perhatian dan penindjauan Parlemen.

Seperti telah dimadjukan diatas, maka kedua pendirian Pemerintah itu tidak dapat saja terima dengan madjukan beberapa keberatan terhadap pendirian Pemerintah yang tersebut itu.

Pertama kami tindjau dari daratan politik. Kita tahu, sebelum termijn 1954 itu ditjapai, maka konferensi pembubaran Uni dan pemasukan Irian-Barat akan berlangsung beberapa minggu lagi, djadi kira-kira pada penghabisan 1952 ini djuga. Sudah pasti Uni statuu dengan segera akan lumpuh dan tidak akan berlaku lagi bagi Republik Indonesia, sedangkan perhubungan Indonesia - Belanda akan berlangsung diluar hubungan Uni dan menurut perdjandjian-perdjandjian Internasional biasa. Karena pendirian Pemerintah mengenai kebutuhan kepada Misi Militer

Belanda itu dengan pasti akan sampai kepada tahun 1954, sehingga dalam pendirian itu dapatlah dibatja pendirian yang positif jaitu akan perdjandjian baru mengenai Misi Militer Belanda yang lepas dari Uni-statuu pasti akan dibubarkan itu. Maka pendirian Pemerintah yang sedemikian itu sungguh-sungguh tidaklah sesuai dengan pendirian nasional Indonesia. Ditindjau daripada sudut claim-nasional Irian-Barat, maka pendirian Pemerintah yang oleh sebab itu tersebut tidak nasional, mengandung arti akan memberi konsepsi lagi kepada Belanda, sedangkan menurut utjapan seorang Menteri Belanda dan Ratu Juliana akan terus-menerus mendjadjah tanah air kita Irian-Barat. Djadi pendirian yang a-nasional itu menimbulkan sikap yang sangat empuk terhadap claim nasional yang kuat dan kokoh didukung oleh Rakjat Indonesia itu. Selain daripada memadjukan keberatan didataran politik, ada lagi keberatan psychologisch dari rakjat Indonesia terhadap Misi Militer Belanda itu. Menurut per-setudjuan, maka Republik Indonesia membutuhkan bantuan untuk pembangunan pertahanan Angkatan Perang Republik Indonesia, menerima nasehat serta, bantuan-bantuan teknis dari Misi Militer Belanda, tetapi fasal-fasal per-setudjuan itu menimbulkan sikap rakjat yang berpendapat, bahwa tentara kemerdekaan kita menerima adjaran daripada bekas musuh. Malahan ada yang berpendapat dari kalangan Indonesia, bahwa di Pentagon Gambir-Barat dan Gambir Utara telah berlangsung perkawinan antara Misi Militer Belanda dan pimpinan tentara Indonesia. Sampai kemana benarnya perhubungan rapat atau infiltrasi daripada tentara Belanda kepada pimpinan tentara Indonesia tidaklah dapat dijatakan dengan bukti-bukti yang tertentu apabila harus dijatakan dengan angka-angka untuk menundjukkan intensiteit perhubungan antara tentara Asing dengan tentara Nasional. Walaupun harganja beberapa edjekan belum dapat diterima a priori begitu saja, tetapi siapa mau mendengar suara dari kalangan Rakjat suara dari kalangan Rakjat, dengarkanlah beberapa tjontoh, bahwa reaksi daripadanya adalah psychologisch djelek sekali. Pernah diujapkan diberapa tempat dipulau Djawa, bahwa N.M.M. ialah Nederland minta minum-makan, bahwa M.M.B. ialah Mata-mata-Belanda.

Lagi pula Rakjat dapat menundjukkan tempat-tempat dipulau Djawa, Bandung sampai

Surabaya, dimana anggota N.M.M. tidak sadja bertemu bersukaria melainkan djuga membitjarakan soal politik dan siasat mengenai Indonesia. Memang pada waktu damai dan tenteram seperti sekarang ini bertebarnya anggota N.M.M. diseluruh Indonesia itu tidak melihatlah bahaya yang njata, tetapi *potentieel adalah situasi yang dimiliki oleh Misi Militer Belanda ini sangat membahayakan masyarakat dan Negara Indonesia.* Djikalau difikirkan pula, bahwa seluruh N.M.M. ialah sebagian dari kesatuan tentara Belanda, yang menurut disiplin dan Comandonja tidak tunduk kepada tentara Indonesia — menurut perdjandjian —, melainkan ta'at dan patuh kepada tentara Belanda, bekas musuh Rakjat Indonesia dalam mentjapai kemerdekaannya maka mengertilah kita mengapa Rakjat Indonesia, menurut instinkt nasionalnja sangat tjuriga kepada adanja tentara Misi Militer Belanda itu ditanah air Indonesia yang baru sadja merdeka diantaranya dengan melumpuhkan dan membubarkan tentara Belanda kolonial itu. Djuga dapatlah difahamkan oleh karena ternjata keluar, bahwa antara pimpinan Pentagon kita dengan Misi Militer Belanda itu sangat rapat, seolah-olah bertjumbu-tjumbuan, sehingga tak dapatlah Parlemen, beberapa partai politik dan Rakjat umum mendukung tentara Nasional kita yang meninggalkan dasar patriotisme Indonesia itu.

Berhubung dengan ini saja sama sekali tidak setudju djikalau tentara kita kurang patriotismenja. Dan djikalau saja boleh memilih diantara bekas Koninklijke Nederlands Indische Leger dan Tentara Nasional Indonesia sekarang ini dengan memakai ukuran patriotisme, saja tidak ragu-ragu memilih inti-sari daripada tentara kita jaitu haruslah T.N.I., oleh karena ternjata T.N.I. dan laskar-laskarlah yang berdjuaug untuk kemerdekaan tanah air; dan K.N.I.L. itulah yang melawan kemerdekaan dan kedaulatan negara kita.

Perpetjahan sikap dan rasa seperti yang saja gambarkan diatas sangatlah berbahaya terhadap kemerdekaan yang alat pendukungnja ialah seharusnya T.N.I. dan rakjat Indonesia sendiri, yang berdjuaug untuk kemerdekaan dan menegakkan Republik Indonesia kita ini.

POLITIK, TENTARA DAN PEPERANGAN.

Djuga setjara politis tidaklah baik tentara Misi Militer Belanda sebagai militer itu melihat dari dekat bagaimana

keadaan dalam negeri kita. Saja singkirkan berita-berita bahwa mungkin ada perhubungan gelap diantara gerombolan-gerombolan Indonesia dengan bekas K.N.I.L. Saja tidak dapat pastikan kebenaran kabar ini. Saja ulangi sekali lagi, belum dapat memastikan kabarnya bahwa telah terdjadi tawaran dari gerombolan Darul Islam untuk melakukan kerdja sama dengan djenderal major Pereira, pemimpin Misi Militer Belanda; dan walaupun kabarnya tawaran itu memang diteruskan dan dikaharkan kepada Kepala Staf Angkatan Perang, tetapi kabar itu menjatakan ada kemungkinan tumbuhnja perhubungan antara gerombolan dalam negeri dengan pimpinan tentara asing. Djadi potensil ada bahajanja.

Kemudian selainnja keberatan psychologis dan politis, dapatlah pula kami madjukan penindjauan teknis terhadap Misi Militer Belanda itu. Kami dahulukan 2 atau 3 tjontoh yang berhubungan dengan kebutuhan pada bantuan teknis dari luar negeri. Pernah keradjaan Djepang mendapat instruksi dan bantuan dari keradjaan Inggeris dalam membentuk armadanya, dan bantuan teknis itu tidak didjela orang karena menurut ukuran internasional. Memang armada Inggeris pada waktu itu sangat terpujdi organisasi dan spiritnja. Pernah keradjaan Turki mendapat instruksi dan bantuan untuk angkatan daratnja dari pimpinan tentara Djerman, dan penerimaan bantuan itu dipudji orang karena organisasi dan disiplin tentara Djerman dulu benar-benar mengatasi standard internasional. Begitu pula dunia kagum bagaimana negara-negara yang berbatasan dengan Sovjet dapat menerima instruksi atau bantuan teknis dari Moskou, dan bantuan itu tetap dipudji karena organisasi dan tenaga proletar yang tersimpan pada tentara merah sungguh-sungguh mengagumkan dunia dan sedjarah. Demikian pula kerdja sama antara angkatan udara dengan angkatan laut dan darat pada tentara Amerika Serikat seperti dulu dalam operasinja dan aksinja dipimpin oleh djenderal Eisenhower dan djenderal Mac Arthur, mengagumkan dunia demokrasi karena mendapat kemenangan dalam perang dunia kedua. Memang pernah didengar pula pendirian bahwa kita beladjar pada tentara Belanda yang ketjil itu supaja dengan demikian djanganlah kita terdjerumus kedalam ketentaraan negara-negara besar, sehingga Republik Indonesia oleh

karena itu setiap waktu dimana perlu dapat melepaskan diri dari soal-soal ketentaraan negeri ketjil itu.

Tetapi sikap yang negatif ini merugikan Republik Indonesia. Sedjarah peperangan yang lampau membuktikan, bahwa tentara Belanda tidaklah baik ditjontoh dilapangan plin. Tentara Belanda, baik di Eropah ataupun di Hindia Belanda dulu memberikan bukti yang njata, tidak ada mengambil bahagian dalam kemenangan peperangan demokrasi yang kedua, selainnja dalam waktu yang pendek menjerah dan berkapitulasi di Nederland ataupun di Hindia Belanda dulu kepada musuhnja. Berguru kepada bekas musuh yang kalah menjerah itu tak dapatlah dipertanggung-djawabkan menurut perasan dan perhitungan. Djuga tidaklah beladjar kepada tentara Belanda itu pada waktu ini berarti menerima pelajaran dari tangan kedua dan ketiga? Tidakkah lebih baik tentara kita beladjar atau menerima instruksi dari tentara negara-negara besar, yang telah terdjamin nilai dan mutunja menurut ukuran standard internasional?

Djadi keadaan sekarang ini sangatlah menjedihkan terhadap kepada kedudukan tentara kita sebagai alat pendjundjung kedaulatan Negara. Menurut adjaran pudjangga dan Maha guru siasat Von Clausewitz dalam bukunya Von Kriege, yang berbunji „Der Krieg ist das Instrument der Politik“, maka sungguhlah sangat mengetjewakan bahwa alat negara Republik Indonesia pendjundjung kedaulatan keluar pada waktu ini tidak sadja sangat sederhana, melainkan belum sampai kepada pembangunan yang terdjamin organisasi dan semangatnja, melainkan belum sampai kepada menerima instruksi dan nasehat yang sangat masih diper-salahkan mutunja.

Dengan memadjukan bahan dan penindjauan pendapat seperti diatas, maka kami terhadap kepada adanja N.M.M. di Indonesia, mempunyai kesimpulan yang ada samanja, tetapi lebih banjak ada djuga lain-lainnja daripada pendapat Pemerintah, tetapi selanjutnja pendapat saja ada lainnja dari pendapat Pemerintah, yang hendak memperbolehkan M.M.B. itu ada di Indonesia sampai tahun 1954.

Menurut pendapat saja maka untuk kepentingan negara dan perdjuaugan Irian Barat hendaklah dalam tahun ini djuga seluruh N.M.M. itu meninggalkan lautan, daratan dan udara Indonesia.

Sebelum konperensi Indonesia-Belanda berachir, maka hendaklah N.M.M. itu sudah meninggalkan Republik Indonesia, dan djanganlah sekali-kali Pemerintah Indonesia

(Sambungan ke halaman 10)

Bukti tidak adanya Koordinasi

Kini rakjat sudah miskin.

Banjak hongeroedeem karena makan daun-daunan.

Djawatan garam & soda adakan transport laut, djawatan pelajaran mentjelanja.

BERHUBUNG dengan pesanan kapal jang 6 buah banjaknja oleh Perusahaan Garam dan Soda Negara seharga Rp. 33.000.000, dengan 100% bebas dan tidak tergantung lagi pada KPM, kalangan Djawatan Pelajaran menerangkan kepada „Antara”, bahwa benar atas dasar pertimbangan tehnis semata-mata Djawatan Pelajaran dapat dan telah menjtudjui pesanan itu, tetapi ditindjau dari sudut kommersil mereka tidak dapat membenarkan kalau Perusahaan Garam dan Soda Negara itu mendirikan organisasi transport-laut tersendiri.

Dikatakan, bahwa bukan biaya pembelian kapalnja jang menjadi soal, tetapi biaya eksploitasi dan pemeliharaannya akan ternjata lebih memberatkan anggaran belandja negara. DKA dalam keperluan transport-laut, jaitu antara Jawa dan Sumatera, menjerahkan penjelenggaraannya kepada Djawatan Pelajaran. Bilamana pemerintah dalam usaha penghematan a.l. mengadakan pemusatan dari pemakaian dan pemeliharaan mobil, maka tindakan kearah desintegrasi dilapangan transport-laut itu merupakan suatu idee jang sebaliknja daripada aturan² jang berlaku, untuk transport-darat tadi. Demikian pendapat kalangan Djawatan Pelajaran itu.

Menurut mereka, dengan adanya usaha Djawatan Pelajaran jang bertugas melajani keperluan djawatan sipil akan transport-laut, soal memenuhi kebutuhan peggangan lain² lagi, sekalipun menambah kewadajiban Djawatan Pelajaran, pasti tidak memerlukan ongkos² sebegitu besar seperti kalau menjelenggarakan usaha transport-laut tersendiri.

Lepas dari alasan² jang diadjukan oleh KPM hingga usaha pengiriman garam tidak lantjar, kata kalangan itu, harus diingat suatu pelajaran KPM dalam transport garam hanjalah berdasarkan suatu „gentlemen's agreement”, dan tidak lagi atas suatu kontrak, seperti dulu atas Groot Archipel Contract, jang sudah habis termijnnja pada tahun 1946. Memang sudah selajaknja pemerintah berusaha dan mengambil tindakan² untuk mengisi kekurangan-kekurangan itu, tetapi seharusnya tidak dengan djalan jg mahal, kalau ada djalan jang bisa lebih murah.

Sebagai diketahui, 3 dari 6 buah kapal jang dipesan itu adalah masing² dari 500 ton jang telah dipesan dinegeri Belanda, 2 buah masing² dari 280 ton dibikin di Surabaya oleh Droogdok Mij, dan jang sebuah, djuga dari 280 ton, dibuat oleh Verenigde Prauwenvceer Mij, di Pasar Ikan, Djakarta.

Mengenai pesanan 6 kapal ini Djawatan Pelajaran betul diminta pertimbangan²nja mengenai soal² tehnisnja, akan tetapi tidak diminta mengemukakan pendapat-pendapatnja berdasarkan pertimbangan² kommersil dalam soal² jang berhubungan dengan eksploitasi dan penjelenggaraan.

KETERANGAN KPM.

Atas pertanjaan „Antara”, bagaimana pendapat K.P.M. atas

berita² jang menjatakan bahwa usaha K.P.M. ternjata tidak tjukup lantjar dalam soal pengiriman garam, fihak K.P.M. menegaskan bahwa sekalipun kontrak mengenai pengiriman garam sudah berhenti, K.P.M. sendiri tetap berusaha untuk meneruskan pengiriman garam itu.

Ini berarti, kata K.P.M. bahwa ia selalu berusaha untuk menjdiakan tjukup ruangan kapal untuk keperluan tersebut.

Adapun mengenai kekurangan garam di Kalimantan Barat belakangan ini, oleh K.P.M. diterangkan, bahwa hal itu terutama adalah akibat dari „keadaan perairan dimuara Kapuas” jang kurang dalam berhubungan adanya beting (bank), hingga tidak memungkinkan kapal² besar berlarjar terus ke Pontianak. Adapun kapal² jang lebih ketjil, sebagian pada waktu itu digunakan untuk keperluan tentara dan transmigrasi, sehingga semua ini mengakibatkan merosotnja pengiriman garam kedaerah tersebut.

Sementara itu, demikian KPM selandjutnja, djalan perairan dimuara Kapuas telah dikeruk — sekalipun tidak tjukup — sehingga transport barang ke dan dari Kalimantan Barat tidak lagi mengalami kesulitan seperti waktu sebelumnya. Dan sementara itu djuga pengangkutan garam telah dilandjutkan kembali. Menurut K.P.M. kapal „Sambas” jang tiba di Pontianak pada tanggal 14 September j.l. telah membawa 400 ton garam, sedang pada tanggal 29 September didatangkan lagi 200 ton dengan kapal „Aabang”. Kira² tanggal 2 Oktober akan datang lagi kapal „Toboali” dengan membawa garam sebanjak 700 ton, sehingga menurut perhitungan, persediaan garam akan mentjukupi keperluan penduduk Kalimantan Barat.

Menurut K.P.M., transport garam akan dapat dilandjutkan dgn tjara teratur, asal sadja keadaan perairan dimuara Kapuas diperbaiki dan ukuran dalamnja tetap dipelihara. Pada waktu ini ukuran dalam dari perairan tsb. belum djuga memenuhi sjarat. Demikian K.P.M.

Adapun jang menjatakan, bahwa di Bengkalis (Bagan Siapi-api) djuga terdapat kekurangan garam, kata K.P.M., mereka sama sekali tidak mengetahui hal ini dan dari

WILAJAH ketjamatan² Bajat dan Tjawas, kawedanan Pedan, Klaten dulu adalah termasuk wilayah jang subur, dinamakan „gemah ripah loh djinawi”, tetapi dimasa jang achir² ini menjadi daerah hongeroedeem jang banjak rakjatnja hanja kadang² sadja makan nasi, biasanya tiwul, dan ada pula jang hanja daun-daunan sadja.

Keadaan ini jang mendorong bupati dan kepala² djawatan² sosial, penerangan, kesehatan, kehutanan, perindustrian, pertanian, pengairan, kepolisian dan beberapa lainnja 4 hari berturut² menindjau masalah² kemakmuran dan keamanan didaerah ini, jaitu dari tgl. 23 s/d 26/ jang lalu. Djuga Residen Surakarta satu hari turut serta.

Sebagai hasil penjelidikan jang terpenting ada empat sebabnja, jaitu tanah tandus karena penebangan hutan², pertununan rakjat mati, djumlah kelahiran besar, dan keamanan buruk. Kelurahan-kelurahan jang sangat menderita ialah: Tawangredjo, Gunung Gadjah, Merangan, Djambangan, Kebon Krakitan, Krikilan, Djarum dan Bulak.

Sebab² itu didjelaskan sbb.:
1. gunung² dan tanah² sekitar daerah tsb. kini tandus sama sekali, akibat ditebangnja hutan² mulai djaman Djepang jang kemudian dilandjutkan dalam masa revolusi.

Akibat hilangnya hutan² itu, maka air hudjan dimusim-hudjan dengan tiada jang menahannja mengalir dengan derasnja ke tanah² jang datar dengan membawa tanah² jang subur hingga achirnja larut sama sekali. Tinggallah kini tanah jang tandus, jang tak dapat ditanami atau sedikit sekali penghasilannya. Djuga akibat tak tertahannja air hudjan itu, timbulah tiap tahun bandjir jang merusak tanaman² rakjat, dan tak adanya persediaan air dimusim panas.

2. pertununan rakjat — ialah tenun-gendong — jang dulu me-

fihak Perusahaan Garam pun tidak pernah diterima permintaan untuk mengangkut garam ke daerah tersebut. Djuga untuk keperluan ini, K.P.M. bersedia menjediakan ruangan kapal jang tjukup, katanja lagi.

rupakan penghasilan jang sangat besar bagi penduduk daerah itu, kini mengalami kemunduran hebat karena kurang mendapat perhatian dari jang berwadjib. Dewasa ini tinggal 10% sadja jang masih berdjalan, dan inipun menghadapi banjak kesukaran².

3. besarnja angka kelahiran didaerah itu. Menurut statistiek kawedanan Pedan tahun 1951, tambahnja djiwa dalam daerah tsb. tiap 1/2 djamnja ada 1 orang, atau sehari 16 orang, jang berarti tiap tahunnja tambah 5.760 orang. Hasil bumi akibat hilangnya hutan² itu makin lama makin berkurang, hingga pada waktu kehabisan makan, banjak jang menjjual sawah atau ladangnja.

Djika tidak mempunjai pekerjaan, banjak diantara mereka jang meninggalkan desanja untuk menjtjari pekerdjaan dikota², atau banjak pula jang lantas kabur pikirannja dan menggabungkan diri pada gerombolan² grajak.

4. djuga gangguan² keamanan dari gerombolan² grajak jang timbul sehabis elach ke-II jang lalu telah mengakibatkan makin melaratnja penduduk daerah itu.

Kini banjak diantara penduduk dalam wilayah Bajat dan Tjawas itu jang hanja kadang² sadja makan nasi. Kebanyakan mereka makan tiwul, gogik, dan kalau tidak ada sama sekali jang mereka makan, sering mereka hanja makan daun²an sadja. Bahkan kabarnja, achir² ini ada jang makan dedak, jang pada waktu² jang normal sebenarnya hanja dipergunakan untuk memberi makan kuda, dan sebagainja.

Perlu ditambahkan keterangan, bahwa permintaan transmigrasi dari penduduk daerah tsb. hingga kini belum mendapat sambutan baik dari jang berwadjib.

(Antara).

Neratja Ringkas de Javasche Bank.

Jang berikut ini adalah neratja ringkas dari De Javasche Bank jang ditentukan pada tanggal 24 September 1952 sesudah penutupan kas.

Uang mas dan bahan uang mas	Rp. 1.063.181.077.18
Sertipikat depisen karena pembelian mas Dana depisen, rekening valuta	377.707.713.78
Penagihan jang dapat dibajar dengan uang asing	552.298.498.43
Sertipikat depisen karena pembelian valuta Kas	754.293.079.57
uang logam (pasmunt)	105.690.578.93
Diskonto dan uang-muka dengan djaminan jang dapat dibajar dengan uang sendiri ..	119.900.54
Uang-muka kepada Pemerintah Republik Indonesia	685.186.990.19
Perbunngaan modal, dana tjadangan, dana tjadangan chas dan dana uang djasa	3.290.849.349.69
Gedung ² kantor, rumah ² dan perabot.....	59.843.662.40
	73.439.480.99
	Rp. 6.968.134.005.06
Modal	Rp. 9.000.000.—
Dana tjadangan	16.059.453.96
Dana tjadangan chas	40.921.941.34
Dana uang djasa dan tundjangan	3.832.111.30
Dana depisen, passiva luar negeri	865.371.545.96
Uang kertas bank jang beredar	3.689.265.310.—
Sisa ² rekening-koran	
dari Pemerintah Republik Indonesia	
dari Pemerintah Republik Indonesia, rekening E.C.A.	Rp. 496.307.240.80
dari lain ²	Rp. 1201.936.835.55
Pengeluaran ² (afgiften) pada kantor ² sendiri	1.698.244.076.35
Rekening rupa ²	19.677.451.96
	625.762.112.16
	Rp. 6.968.134.005.06

Uang kertas negeri jang diperedarkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Rp. 325.444.979.50
diantarannya: uang kertas negeri lama Rp. 100.821.964.50
uang kertas negeri baru Rp. 224.623.015.—

Suatu hutang luar negeri sampai nilai-imbangan sebesar Rp. 615.600.000.— jang hingga kini adalah ditata-usahakan oleh Dana Depisen, sekarang ditata-usahakan oleh Thesauri Negara Oleh karena itu rekening Pemerintah Indonesia dikreditkan untuk djumlah tersebut Dana Depisen, Passiva Luar Negeri didebitkan untuk djumlah jang sama.

LEKTUR SEDJARAH - SOSIAL - EKONOMI

Disusun oleh: TANTUAH

Ukuran: 15 1/2 x 24, tebal 55 halaman.
Harga tjuma Rp. 3.— (tiga rupiah).

Diantara isinja:

Perkembangan buruh:

- Banjak buruh
- Buruh wanita dan pekerdja kanak-kanak
- Djam bekerdja
- Upah
- Makanan dan penghidupan buruh dan lain-lain.

Pesan pada:

PENERBIT „R A D A”
Dj. Teuku Umar No. 25
Djakarta

Kesulitan Kantor² Pembelian Perusahaan Indonesia.

Keterangan Mr. Basrie dinegeri Belanda.

Sekretaris dari Persin (Persekutuan Saudagar² Indonesia di Nederland) Mr. Basrie dalam interview dengan „Antara” Amsterdam mengemukakan tentang keadaan kantor² pembelian (inkoop-kantor) dari perusahaan² Indonesia di Nederland, terutama yang bersangkutan dengan soal² pajaknya.

Dinjatakan, bahwa kantor² Indonesia itu yang paling lama bekerja di Nederland adalah dari Malaya Import Company Ltd dari Concern Dasaad-Musin, yang mulai buka kantornya di Nederland pada tahun 1948. Selama tahun 1950 dan 1951 maka kantor tsb. dan kantor² pembelian lainnya mendapatkan aanslag dalam pajak-perusahaan atas dasar peraturan sebelum perang yang berpangkal pada prinsip pemisahan keuntungan (winstsplittings).

Dulu, pada waktu perusahaan² import besar di Indonesia pada umumnya mempunyai kantor pusatnya di Nederland dan kantor² pendjualannya di Hindia-Belanda dulu, orang mempunyai pendapat, bahwa sebagian dari keuntungan telah didapat karena kegiatan kantor pusatnya di Nederland. Untuk bagian dari keuntungan ini harus dibayar pajak perusahaan (vennootschapsbelasting) di Nederland.

Peraturan ini sekarang dijalankan pula atas kantor² pembelian dari perusahaan² Indonesia, yang pada pokoknya hanya merupakan bagian dari kantor pusat yang berkedudukan di Indonesia.

Berbagai kepala dari kantor² pembelian tsb. berpendapat, bahwa kantor² pembelian itu, sebagai badan² eksekutif dari kantor pusat di Indonesia, tidak membikin keuntungan dan karena itu juga tidak dapat dikenakan pajak perusahaan.

Mengenai perhubungan antara kantor pusat dan kantor² pembelian dinjatakan oleh Mr. Basrie, bahwa kantor² pembelian itu dalam tiap² transaksi mendapatkan sejumlah persentase dari harga pembelian sebagai komisi. Telah diputuskan untuk menjalankan tjara bekerja seperti diatas ini, karena dengan demikian adalah lebih mudah daripada „overmaking” dari sejumlah uang yang diperlukan tiap kali untuk membejayi keperluan² dan kebutuhan kantor² pembelian itu yang tiap kali harus membutuhkan izin dari kantor devisen.

Dengan sendirinya, bahwa kalau dijalankan tjara pemisahan keuntungan, maka administrasi pajak harus mempunyai angka² balans rekening untung rugi dari perusahaan pusat dan juga dengan sendirinya, bahwa perusahaan² Indonesia tidak mau menundukkan dokumen²nya pada kantor pajak dari negara asing. Inilah yang menyebabkan kantor²

Indonesia itu dikenakan aanslag. Karena ini maka berbagai kantor-kantor pembelian Indonesia ada dalam kesulitan².

MENGUSAHAKAN ADANJA PERSETUDJUAN PADJAK.

Dengan adanja perantara dari Komisaris Tinggi Indonesia di Den Haag dan dengan adanja sikap yang baik dari Kementerian Keuangan Belanda, maka aanslag² pajak tsb. untuk sementara waktu diundurkan, untuk memberikan kesempatan kepada panitia² dari pemerintah² Indonesia dan Belanda untuk mengadakan perundingan guna penjujukan suatu perdjandjian mengenai pajak yang dapat mengadakan pemberesan dalam persoalan penarikan pajak dubbel.

Berhubung dengan itu beberapa waktu yang lalu telah berangkat ke Indonesia suatu komisi Belanda yang telah mengadakan perundingan² di Indonesia. Perundingan² tsb. telah berhasil dengan penjujukan suatu rentjana persetudjuan yang mengatur, bahwa stelsel pemisahan keuntungan (winstsplittings) yang dilakukan sedjak djaman perang tidak akan digunakan lagi, dan sebagai gantinya diterima baik prinsip hukum internasional yang berdasar pada tjara langsung dan objektif dari masing² boekhouding dan dalam literatur disebut tjara „comptabilité séparée”. Persetudjuan ini telah diparap dan nantinja akan diratifikasi, sesudah disetujui oleh masing² parlemen. Sesudah itu baru dapat dijalankan persetudjuan itu.

SEBAGIAN BESAR DARI TRANSAKSI TIDAK DENGAN NEDERLAND.

Mr. Basrie menjatakan, bahwa sebagian besar transaksi² yang dilakukan oleh kantor² pembelian Indonesia di Amsterdam dan dilain² tempat di Nederland adalah tidak dengan firma² Belanda, tapi sering² dengan perusahaan² Djerman, Inggris, Perantjis, Italia, Swedia dan Swiss. Berlainan dengan pemerintah Belanda, maka pemerintah Djerman berpendirian, bahwa kantor² pembelian dinegeri tsb. di Djerman merupakan perusahaan, Kantor² tsb. disana mendapatkan fasilitas² yang tidak sedikit, mengingat adanja kantor² tsb. di Djerman merupakan keuntungan bagi industri² export Djerman.

R A L A T

Dalam M.K. j.l., karangan mengenai Kashmir, pada hal. 9, kol 5 (sambungan), baris kedua dari atas, terdapat:

ialah karena almarhum itu tidak bersikap

Semestinja:

ialah karena almarhum itu terlalu bersikap

Atas kesalahan tsb. kami meminta maaf!

Korrektor. PERUBAHAN

(Sambungan dari halaman 3)

rakjat Indonesia, terutama kelas buruh, maka itu adalah „pembangunan imperialistis” yang memaknai merek NASIONAL, yang dibela mati²an oleh golongan dan orang² tertentu yang sebenarnya adalah golongan dan orang² yang anti-nasional dan anti-buruh.

Pembangunan nasional yang benar-benar dapat menguntungkan kepada Negara dan Nasion Indonesia tidak mungkin dilaksanakan apabila kehidupan ekonomi masih dikuasai oleh modal raksasa monopoli, jaitu apabila alat² produksi vital (perindustrian, perkebunan, pertambangan, angkutan) belum dikuasai oleh Negara Nasional Indonesia. Karena kepentingan imperialistis dari modal raksasa monopoli yang menuntut Persetudjuan KMB harus didjamin yang lajak oleh kekuasaan Negara R.I. senantiasa bertentangan dengan kepentingan Nasional dari nasion dan rakjat Indonesia.

Sekalipun pemerintah Nasional Indonesia dengan kedjudjuran dan kemauan baik untuk melaksanakan tiap² rentjana pembangunan nasional yang menguntungkan Negara dan rakjat, pasti akan mendapat tentangan dari kelas imperialis, karena bertentangan dengan kepentingannya. Pada akhirnya pemerintah Nasional Indonesia pasti berkapitulasi (menjerah), karena ditekan oleh modal raksasa monopoli berdasarkan Persetudjuan KMB dan lain² persetudjuan dan perdjandjian imperialistis yang mengikat „kemerdekaan dan kedaulatan” Negara R.I.

MANIFEST POLITIK NOPEMBER 1945, MEMBUKA PINTU KETJELAKAAN.

Keadaan yang menjedihkan, bahwa pemerintah Nasional Indonesia dari Negara apabila orang mengerti, bahwa pemerintah Nasional Indonesia dari Negara apabila orang mengerti, bahwa pemerintah Nasional Indonesia dari Negara R.I. dalam menjalankan kebijaksanaan politiknya senantiasa berpedoman kepada Manifest Politik Nopember 1945.

Bahwa politik reformis dan reaksioner itu masih tetap menjadi pedoman dari pemerintah Wilopo, adalah ternjata dalam keterangan P.M. Wilopo tentang program kabinetnya yang berbunyi demikian: „..... didalam usaha memajukan tingkat penghidupan rakjat masih perlu dibuka kesempatan bagi perusahaan dan modal asing untuk turut serta mengambil bagian dalam usaha perekonomian.” (Madjallah Warta Ekonomi 17/5-'52, No. 20 halaman 352).

Dari keterangan itu dapat dimengerti, bahwa untuk kepentingan „pembangunan nasional mengisi kemerdekaan”, pemerintah Wilopo memandang kurang tjukup adanja modal raksasa monopoli yang telah menjengkeram kehidupan ekonomi Indonesia pada masa ini. Untuk memajukan tingkat penghidupan rakjat” masih dibutuhkan adanja perusahaan dan modal asing.

Modal asing yang dibutuhkan itu menurut pernyataan P.M. Wilopo baru² ini adalah modal dari negara² imperialis yang sedang diserang krisis. Karena dalam pernyataan itu a priori P.M. Wilopo menolak segala matjam bantuan dari Sovjet Uni yang anti-imperialis.

Dengan memasukkan modal asing itu, maka pemerintah Wilopo mempererat ikatan² imperialistis dari Negara R.I., keadaan mana tidak sadja menambah besarnya kesukaran dan kesulitan yang dihadapi oleh negara, tetapi juga menambah penderitaan dan kesengsaraan bagian terbesar dari rakjat Indonesia.

Dalam hubungan ini tentu ada orang yang mengatakan, karena Negara R.I. mempunyai „kekuasaan politik”, maka dapatlah diadakan undang² negara atau peraturan² pemerintah yang menjegah supaya modal asing itu tidak merugikan kepentingan nasional.

Orang yang berkata demikian itu adalah tidak mengerti atau pura² tidak mau mengerti akan kedudukan politik Negara R.I. dalam ikatan Persetudjuan KMB yang imperialistis itu.

Kalau terhadap serangan ekonomis dari modal raksasa monopoli asing yang telah berada didalam negeri Indonesia, pemerintah R.I. tidak dapat mempergunakan „kekuasaan politiknya” untuk melindungi kepentingan bagian terbesar dari rakjat Indonesia, maka terhadap modal asing yang akan masuk dan diadjak masuk itu sikap pemerintah R.I. tentu lebih lemah lagi.

Sekalipun dalam menjalankan kebijaksanaan politik memasukkan modal asing itu pemerintah Wilopo dengan kedjudjuran dan kemauan baik untuk „mempertinggi kemakmuran rakjat”, pasti akan berhasil sebaliknya, jaitu tambahnja penderitaan dan kesengsaraan bagian terbesar dari rakjat Indonesia.

Maka itu, untuk dapat mengatasi kesukaran dan kesulitan yang dihadapi oleh Negara pada masa ini, dan untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional yang benar² menguntungkan dan membawa kebahagiaan kepada seluruh rakjat Indonesia, tidak ada djalan lain ketjuali menghapuskan kedudukan setengah djadjaan dari Negara R.I.

Soal itu dapat diundukkan dengan membuang politik reformis dan reaksioner yang tertjantum dalam Manifest politik Nopember 1945 dan menggantinya dengan kebijaksanaan politik yang revolusioner dan konsekwen anti-imperialis, jaitu politik yang bertudjuan kepada pembatalan semua persetudjuan dan perdjandjian imperialistis yang mengikat kemerdekaan dan kedaulatan Negara R.I. dan melaksanakan setjara sistematis dan sungguh² fasal 38 UUD.

Hanja dengan merobah haluan politik itulah maka bahtera Negara R.I. dapat dikemudikan menuju kesedjahteraan dan kebahagiaan hidup bagi seluruh rakjatnya.

(Sambungan dari halaman 8) memperpanjang atau membuang perdjandjian baru dengan Belanda mengenai M.M.B. lagi.

Oleh sebab itu saja ingin sekali mendengarkan sikap Pemerintah terhadap pendirian saja diatas.

Saudara Ketua, pada bulan² yang akan datang maka Republik Indonesia rupa-rupanya akan menghadapi pemertjahan beberapa soal nasional diforum internasional. Seperti kelihatan sekarang Belanda rupanya tidak akan mempersoalkan Irian Barat didalam konferensi kedua negara, tetapi akan membawa soal itu kesidang P.B.B. di New York pada bulan Oktober 1952 ini.

Maka berhubung dengan sikap yang telah terbitika itu, maka sungguhlah tidak ada gunanya untuk memberikan konsesi kepada Belanda dilapangan apapun djuga, sekali-kali djangan berhubung-an kerdja sama dilapangan pertahanan berupa N.M.M. yang mungkin akan merugikan negara dan akan menjinggung kedaulatan Rep. Indonesia kita.

Selain daripada itu saja melahirkan ketjurigaan kepada situasi internasional pada waktu ini. Sekiranya situasi ini sedikit sadja berpindah dari dunia perundingan kemedan pertempuran, maka mungkin pantai Pasifik barat tidak akan terhindar dari bahaya itu. Saja sendiri tidak ada berkejakinan peperangan dunia ketiga dengan segera akan datang. Tetapi sekiranya ramalan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka timbulah pertanjaan; apakah djadinja dengan kemerdekaan nasional dan kedaulatan Republik Indonesia yang sekarang memiliki tentara yang menimbulkan kesan dalam keadaan seolah-olah kutjar-katjir dan gedes-organiseerd pada badan dan semangatnja, sedangkan pembentukan tentara baru masih dalam keadaan yang sedang dipersoalkan? Saja yakin sebaliknya, bahwa rakjat Indonesia dalam segala keadaan akan membela dan mendukung kemerdekaannya, tetapi tidakkah bangsa Indonesia berhak memiliki satu tentara nasional yang dapat dibanggakannya sebagai alat pelaksanaan politik negara menuju perdamaian dunia?

Saudara Ketua, saja mentjoba melahirkan pendirian saja menurut pikiran rakjat Indonesia yang sederhana terhadap pimpinan Angkatan Perang kita dengan harapan, bahwa uraian ini ialah menjadi terdjemahan kesadarannja sendiri. Tetapi djuga uraian dari mimbar Parlemen ini saja tudjukan setjara tidak langsung kepada pemerintah Belanda, bahwa bangsa Indonesia tidak membutuhkan lagi kerdja sama dilapangan pertahanan, perekonomian dan keuangan selama Irian Barat belum dikembalikan kepada Republik Indonesia.

Sutardjo Kartohadikusumo Menagih Presiden.

Supaja djangan hanja mensinjalir sadja adanja krisis gezag,
tapi djuga berbuat untuk mengatasinja.

„PRESIDEN SOEKARNO DJANGAN HANJA MENSINJALIR DAN MELANSIR ADANJA KRISIS GEZAG SADJA SEKARANG. SAJA TAGIH SUPAJA IA DJUGA BERBUAT LEBIH DARI PADA ITU, JAKNI BERTINDAK DENGAN DJALAN MENINDJAU DIRI SENDIRI, MENGOREKSI DIRI ATAU ZELFCORRECTIE JANG KEMUDIAN DISUSUL DENGAN 1001 MATJAM TINDAKAN DAN USAHA SUPAJA GEZAG ATAU PERBAWA-PRADJA (GEZAG) ITU KEMBALI KEPADA SINGGASANANJA DAN RAKJAT TERHINDAR DARI MATJAM KEKETJEWAN.”

DEMIKIAN PERINGATAN SUTARDJO KARTOHADIKUSUMO, ANGGOTA DEWAN PARTAI P.I.R., DIDALAM TJERAMAHNJA, JANG DIADAKAN SEMALAM DIMUKA PARA UNDANGAN BERHUBUNG DENGAN BERACHIRNJA KONPERENSI PARTAI P.I.R. SE-DJAWA BARAT.

Setelah menegaskan, bahwa perbawa-pradja itu mengandung arti pengaruh kekuasaan batin (geestelijk overicht) jang bersifat abadi dan pengaruh lahir seperti ketjerdikan, keberanian, kekuatan tenaga, kekerasan sendjata, jang bersifat sementara menurut waktu, maka pemitjara menjatakan pendapatnja tentang syarat-syarat pimpinan negara.

Pimpinan negara itu harus mengenal djiwa rakjat jang dipimpinja, kata Sutardjo. Kalau syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka perbawa-pradja terhadap rakjat itu akan rusak. Intellek sadja tidak tjukup untuk pegang pimpinan itu, tapi harus dipenuhi djuga syarat-syarat keadilan, kedjurdjuran.

Tidak adanja gezag sekarang, bukan sadja karena kurangnya syarat-syarat bathin itu dipenuhi, tapi djuga karena pimpinan tidak mengenal rakjatnja.

Pemitjara mengambil tjontoh-tjontoh jg. sudah berlangsung sedjak zaman proklamasi, jaitu banjaknja peraturan negara jang dibuat pimpinan, tidak dapat didjalankan atau kalau didjalankan melukai hati rakjat.

DJURANG ANTARA PIMPINAN DAN RAKJAT.

Setelah merdeka, dinegara kita ini sebetulnja hanja terdjadi suatu mutasi, jaitu pimpinan negara dari tangan Belanda beralih kepada tangan orang Indonesia. Tapi selain dari pada itu tiada perubahan.

Sebabnja ialah karena tenaga-tenaga pimpinan itu umumnya „westers georiënteerd” dan sekarang dihadap-mukakan dengan rakjat jang masih berada dalam alam hidup jang sangat bersahadja.

Pimpinan itu, karena berpendidikan Barat, memakai nilai-nilai Barat jang masih asing bagi rakjat. Oleh karena itulah timbul suatu djurang jg. dalam antara pimpinan dan rakjat.

Menurut pemitjara, djuga sistem kepartaian dan organisasi adalah sifat Barat dan tidak dikenal rakjat. Sistem kepartaian itu hendaknya disesuaikan dengan tjara hidup bangsa, sebab kalau tidak, maka nistjajalah akibatnja akan destruktif, sehingga rakjat itu terpetjah-belah dalam berpuh-puluh bagian.

Partai djuga mengintrodusir paham-paham jang asing bagi rakjat, seperti individualisme, liberalisme, materialisme, hingga achirnja timbul perebutan kekuasaan, perebutan pangkat, berlomba mengumpulkekan kekayaan, korupsi besar-an.

Istilah demokrasi atau kedaulatan rakjat didengungkan tanpa pendjelasan tentang artinja dan tjara pelaksanaannya. Maka 3 orang sadja dgn. pakai nama „kedaulatan rakjat” sudah bisa mendaulat, membunuh, mentjulik „atas nama rakjat”. Achirnja demokrasi mendjadi anarchie. Dan dalam pada itu tiada gezag atau perbawa-pradja jang bertindak.

PELANGGARAN SEGALA DASAR NEGARA HUKUM.

Mengenai agitasi sekarang, Sutardjo menjatakan, bahwa dalam keadaan damai, agitasi sudah tidak bisa diterima lagi oleh rakjat, karena rakjat itu menuntut bukti dari djandji jang muluk-muluk dimasa revolusi.

Dan pihak jang berwadajib sendiri tidak memelihara dasar-dasar negara hukum; Undang Dasar, Undang Peraturan Negara lainnja dilanggarnya dengan tiada akibat

sesuatu. Instansi jg. berkuasa tak punja „moreele moed” (keberanian) untuk bertindak.

PEMETJATAN SEWENANG-WENANG PER TELEPON.

Keketjauan itu mengenai djuga nasib pegawai negari, jang ditentukan menurut hukum. Pemindahan, pemitjatan dilakukan dengan sewenang-wenang. Bahkan ada seorang pegawai tinggi jang dipetjat tidak dengan pakai besluit, melainkan hanja tjukup sadja dengan „setjara telefonisch”. Tapi sebaliknya pegawai jang njata salah malah dinaikkan pangkatnja.

MANA DESENTRALISASI JG. DI-IDAM-IDAMKAN ?

Mengenai desentralisasi pemitjara mengambil tjontoh Undang Pokok No. 22 tahun 1948 jang telah tersohor itu, dan jang merupakan politik jang dianggap bisa mendatangkan kenikmatan.

Tapi ternjata politik desentralisasi itu presis seperti dizaman pendjadjahan Belanda. Bahkan setelah Negara Kesatuan lahir, orang boleh tetap tinggal menunggu. Keadilan tidak datang sadja. Sekarang didaerah-daerah, Dewan-dewan pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak bisa bekerdja karena tidak ada pekerdjaan. Herankah kalau orang mendjadi ketjewa?

Sebab, bukan desentralisasi jang terdjadi melain beribu-ribu lurah dipetjat zonder vorm van proces; dengan tjara jang menyusuk hati orang mentjoba melenjapkan perdikan-perdikan desa, swapradja.

„Saja bukan pro-swapradja, tapi tjaranja jang tidak keruan itu menyusuk hati orang-orang jg. bersangkutan jang menghendaki adanja sesuatu peraturan jang dibutuhkan didalam negara hukum”, kata Sutardjo.

Mengenai perpetjahan selanjutnja dinjatakannya, bahwa persatu-paduan dimasa revolusi antara tentera-pamong-pradja-rakjat, jang dikatakan merupakan people's defence, sekarangpun sudah mulai retak. Antara tentera dan rakjat terdapat djurang jang lebar.

Dan jang lebih menjedilkan ialah, bahwa instansi, jang harus memelihara adanja rechtszekerheid, melakukan djuga perbuatan

jang begitu menjolok mata hingga mendjadi buah bibir umum.

Dan sementara itu belum ada djandji kepada rakjat jang dipenuhi; rakjat tetap melarat. Demikian Sutardjo Kartohadikusumo dalam menggambarkan betapa mendalamnja krisis gezag sekarang ini.

APA OBATNJA ?

Menurut pendapat pemitjara obatnja ialah tidak lain dari pada harus dikembalikannya lagi nilai-nilai batin dari sesuatu gzeag, jaitu mengusahakan kembali zelfcorrectie supaja orang-orang didalam pimpinan mempunyai keluhuran budi. Disamping itu harus didjalankan usaha-usaha kewadajiban lahir-lahir, jang tidak usah merupakan usaha jang muluk-muluk melainkan usa-

MENDJADI PEMIMPIN ZAMAN „REVOLUSI”, BELUM BERARTI PEMIMPIN SEDJATI.

ha-usaha jang sederhana sadja, jaitu umpanja menghilangkan sebab-sebab hongeroedeem, menghilangkan kemiskinan dsb.nja. ANTARA).

(Sambungan dari halaman 12)

KOMENTAR KILAT

Oleh sebab itu menimbangpun orang sekarang tidak sanggup lagi. Untuk praktek demokrasi didaerah-daerah, dengan memberikan dewan perwakilan rakjat, dikatakan tidak ada uang, harus menghemat. Tapi kalau untuk mendjau pemilihan, pemerintahan d.s.b. dinegeri jang tidak ada sangkut pautnja dan persamaannya dengan keadaan daerah dan rakjat kita di Indonesia ini, berapapun devisa dihabiskan apa. Djadi soal demokrasi itupun nampaknja sekarang hanja untuk orang jg. pandai, sanggup dan berkesempatan makainja sadja. Sedangkan didalam satu partai pun belum tentu ada demokrasi jg. betul merata diseluruh anggótanja.

Ach negara hukum, negara demokrasi Indonesia jang berrepublik dan berpan-tjasila ini bilakah kamu lagi akan dapat menjebut jang benar, jang sesuai dengan kenjataan jang dialami oleh rakjat sehari-hari? Kabarnja kebohongan itu akan dikedjar oleh kebenaran.

Apa ija! Kalau tidak dikerdjakan?

Dari itu, siapa jang ingin kebenaran, harus bikin dan kerdjakan kebenaran itu!

Inilah nasehat.

Si Butcut.

Langkah baru

Setelah selama enam bulan memperlengkapkan diri dengan mesin-mesin dan alat-alat pertjetakan lainnja jang serba baru dan modern, menempatan tenaga-tenaga terpilih, menggebleng djiwa nasional dan semangat kerdja buruhnja, djuga mengadakan djaminan sosial sederhana untuk menudju kearah djaminan penghidupan jang lajak bagi buruh seperti dimaksudkan dalam Undang-Undang Kerdja kita, maka:

PERTJETAHAN „SENO”

dengan bekerdja siang dan malam siap sedia melajani segala pekerdjaan pertjetakan menurut keinginan para pemesan dengan tidak mengetjewa-kan. Segala matjam pekerdjaan pertjetakan, madjalah, staten, saham-saham, diploma-diploma, dls., baik jang merupakan pesanan besar maupun ketjil, sanggup pula mengerdjakannya dengan tjernat, tepat dan tjepat. Sebagai perusahaan nasional jang mentjoba ikut serta memberikan isi dilapangan pembangunan,

SENO

sangat mengutamakan kwaliteit jang tinggi dengan ongkos jang lajak. Pesenan pekerdjaan pertjetakan dapat dilakukan di:

DJALAN WARINGIN 59, TELP. GBR. 1016
diantara djam 8 pagi hingga djam 3 siang.

DJALAN SENAJAN KEBAJARAN BARU
diantara djam 8 pagi hingga djam 9 malam.

TJATATAN :

Kepada para langganan diharap akan berhubungan langsung kepada Direktur persoonlijk tentangan sesuatu kechilafan atau kekurangan sempurnanja sesuatu barang tjetakan, djika sekiranya ada terdapat.

KOMENTAR KILAT

PANTJA KRISIS:

Bung Karno menindjau ke Djawa Tengah. Dalam menindjau berpidato. Turut berita, dalam delapan hari menindjau, bikin pidato 33 kali. Djadi lebih 4 kali satu hari. Biasanja orang makan sehari, tiga kali. Djadi Bung Karno sudah lebih banjak kalinja berpidato daripada kalinja makan, dalam delapan hari itu.

Satu kemajuan djuga, bukan, walaupun banja sekedar pidato. Pidato dalam menindjau.....

Turut berita lagi, Bung Karno ada madjukan dalam pidatonja di Solo tentang satu Pantja baru, jaitu pantja-krisis. Lima krisis, jang telah menimpa Indonesia, maka keadaan sekarang tidak karuan, katjau dan kutjar-katjir, hampir bangkrut dan sebagainya.

Apa isi pantja baru itu? Pertama krisis politik. Kedua, krisis berpikir dan..... menindjau. Ketiga, krisis alat² negara. Keempat, krisis moril (achlak). Kelima, krisis gezag (kekuasaan).

Nah, lihat pantja baru Bung Karno itu. Pantja Sila belum beres, baru tinggal perhiasan kertas dan kadang² perhiasan bibir. Sekarang datang lagi pantja baru. Besok lusa entah pantja apa lagi jang akan datang. Menimpa Indonesia ini.

Karena telah dimulai dengan pantja, waktu lahirja negara Indonesia merdeka, maka rupanja akan terus menerus ada pantja, pantja satu dituruti oleh pantja lain. Anebnja pantja² itu, bukan berarti keuntungan, tapi kerugian, seperti pantja jang paling baru ini, malahan berupa penjakit, jang susah mengobatnja. Jang diserangnja ialah orang Indonesia. Djadi jang rugi ialah Indonesia.

Kalau keuntungan, djangkalan pantja, satupun tidak ada jang datang.

Tapi bagi bangsa asing, datangnja dan masuknja keuntungan itu bukan satu dan bukan pantja, malah berlipat-lipat pantja, entah pantja kali pantja, entah pantja pangkat pantja (5⁵, lima pangkat lima).

Kalau kita analisa lebih djauh pantja baru Bung Karno itu, maka jang ditimpanja, terutama bukan rakjat djelata, bukan rakjat marhaen, bukan rakjat murba, tapi kaum atasan, golongan senang dan mewah, jang berpangkat, jang berkedudukan, jang mendapat keuntungan dengan adanja Indonesia „merdeka“ sekarang ini.

Jang pertama krisis politik. Siapa jang bermain politik? Tentu orang² jang menamakan dirinja pemimpin rakjat, jang mengepalai partai². Kata Bung Karno, mereka itu djegal²an, artinja persaingan hebat, djatuh mendjatuhkan setjara tidak sportief, sehingga demokrasi itu (pemakaiannya oleh para pemimpin) bukan mendatangkan kebaikan, melainkan keruntuhan dan kedjatuhan. Perpetjahan meradjalela, bukan sadja antara patai dengan partai,

tapi djuga didalam satu partai, aliran orang banjak berlainan, bahkan bertentangan. Perpetjahan sudah begitu mendalam sehingga orang tidak lagi pertjaja mempertjajai, tapi intai-mengintai dan djatuh mendjatuhkan, bunuh-membunuh.

Krisis pikiran dan tjara berpikir, begitu djuga menindjau dan tindjauan. Jang satu mentjela jang lain dan jang lain mengkritik jang lain lagi. Kiri dan kanan mendjadi bentrokan, berantakan, ada jang pro ini dan ada jang pro itu. Buktinja jang sudah njata, embargo. Kirim karet hanja kepihak Amerika, kepihak demokrasi rakjat tidak boleh Rakjat menangis, negara rugi, tapi sang pemimpin tidak merasa apa², sebab menurut tindjauan, pandangan dan pikirannya, itulah jang betul..... buat dia. Jang rakjat tidak usah dipikirkan. Kedua, MSA diterima, jang akan mengikat leher rakjat Indonesia. Itupun menurut pandangan pemimpin sudah betul, harus berpihak ke Amerika, biar rakjat nanti didjadikan heiho, umpan pelor bagi peperangan jang akan dipetjahkan oleh Amerika. Ketiga, tangkapan² dan razia didjalkan. Ribuan orang masuk pendjara, belakangan dilepaskan begitu sadja. Inipun menurut pandangan pemimpin sudah betul, karena itu didjalkan. Orang menderita karenanja, tidak apa....

Krisis alat² negara, tidak sanggup mengatasi kesukaran, tidak mampu memberikan apa² jang berguna bagi rakjat. Dulu rakjat begitu, sekarang begitu djuga. Dulu sistem pendjadjahan, sekarang sistem itu diteruskan. Karena itu krisis bertambah lagi, dengan adanja krisis gezag. Kekuasaan tak dihormati, rakjat bersikap masa bodo (apatis).

Jang kelima ialah krisis achlak, tidak segan berbuat jang salah, berbuat kedjahatan. Baik jang terang²an, maupun jang samar² dan dapat disembunjan. Peraturan diadakan bukan untuk diturut melainkan untuk dilanggar. Makin pandai dan litjin melanggarnya makin terpujji, makin pandai memutar² dan memainkan juridis-formalisme d.s.b. makin baik. Makin naik keatas sehingga tidak terpanang lagi oleh rakjat, „beliau“ jang naik itupun sudah susah pula memandang pada rakjat jang sudah djauh tertinggal dibawah.....

Dan perpisahan serta perdjahan antara rakjat dibawah dengan orang jang diatas, inilah pokoknja segala krisis itu. Orang diatas sudah lain dari rakjat dibawah, kepentingannya kadang² sudah bertentangan. Kalau madju rakjat mungkin ia merasa rugi dan sebaliknya bila rakjat tertindas terus, mungkin ia mendapat untung terus. Golongan atas dan rakjat dibawah tidak sedjiwa lagi, tidak setjita² lagi seperti dulu dizaman perdjangan, dizaman pendjadjahan. Waktu itu jang dikatakan pemimpin terasa oleh rakjat, dimengerti oleh rakjat, Tapi sekarang.....?

Oleh sebab iu kalau hendak mengobai penjakit jang berupa pantja krisis itu, golongan atas sekarang haruslah kembali kepada rakjat, mempertjajai rakjat, yakin akan tenaga rakjat dan kesanggupan rakjat, bela dan pertahankan kepentingan dan tjita² rakjat. Kalau rakjat sudah mengerti, sudah sedjiwa dengan pemimpin dan pembesar, tanggung beres. Buktinja sudah banjak, dinegeri² lain jang sudah mendjalankan repolusi. RRT umpamanya, dimana pemimpin dan pembesar djelas kelihatan sebagai abdi rakjat, memberi tanah pada rakjat, memberi kerdja pada rakjat, makanan dan pakaian kalau mau dan tjukup banjak, usahakan dan tjari sendiri. Alam Tiongkok tjukup kaja. Jang ada pakai dulu dan makan dulu, jang belum ada, mari ditjari bersama-sama, tapi djangan mintak pada Amerika atau Inggeris atau Sovjet. Bikin sendiri dan pergunakan sendiri, inilah tandanja bangsa merdeka.

Berakit² keulu, berenang² ketapian, bersakit² dahulu, berenang-senang kemudian! Sama², serentak, dari atas sampai bawah, satu front, satu kata, satu tindak dan satu laku. Ini jang akan dapat dimengerti rakjat, dan penjakit pantja krisis itu hanja akan sembuh, bila dimengerti oleh rakjat dan rakjat sudi ikut memberantasnja. Berilah tjontoh, kalau betul pemimpin.....

Nampaknja ada langkah jang sudah dimulai, seperti pembatalan MSA jang sedanja akan mengikat leher rakjat. Pun pembebasan Chairul Saleh, djuga satu tindakan jang dapat dimengerti oleh rakjat. Selama ini orang bertanja² dan terheran²: Apa sebab orang pedjuang, salah satu pelopor kemerdekaan jang melahirkan proklamasi, harus disimpan dan meringkuk bertahun² dalam pendjara.....? Tidak ada salah, tidak ada perkara, pengadilan menolak memeriksanya. Kalau orang seperti ini dimusuhi, sungguh² tidak dimengerti oleh siapa sadja jang ingin merdeka. Tapi tidak akan mengherankan, kalau sekiranya kaum imperialis atau pendjadjah Belanda jang menangkapja dan menjimpanja dalam pendjara.

Tapi pembesar dan pemimpin sekarang toh bukan pengganti pendjadjah Belanda? Kalau boleh bertanja. Tapi sebaiknya dijawab dengan tindakan² terus. Soal embargo masih tetap tidak dimengerti oleh rakjat.

PENGADILAN DAN KEADILAN.

Corr. „Menara Kita,“ dari Sumatera Selatan menulis sbb.:

Korupsi agaknya satu tradisi zaman merdeka. Pegawai pelabuhan Pandjang ada 14 orang jang kini ditahan, karena tersangkut penjelundupan karet sekian ratus ton ke Singapura, kira-kira dua bulan jang lalu. Bagi rakjat soal itu sudah

djelas, sebab telah njata dapat dibuktikan kemewahan mereka jang luar biasa, mempunjai beberapa buah gedung jang bagus-bagus, perkakas rumah jang sangat mentereng, ada jg. punja taxi dan opelet, satu dua, tiga atau lebih seorang. Sampai ke Bengkulu sudah mendjalar kemewahan mereka, bikin ekspansi, dengan membeli gedung² pula disana.

Bagi rakjat sudah maklum pula, bahwa mendjadi djurutulis di pabean adalah lebih berarti daripada mendjadi komis kepala dikantor lain, sebab lebih terdjamin, kelebihan barang dari semestinja, uang-salam banjak dari para pedagang, banjak laka'..... d.s.b.

Rakjat ingin tahu betul akan dibagaimanakan oleh jang berwadjab para koruptor jang sudah disimpan itu. Ingin tahu karena selama ini bila seorang rakjat mentjuri barang seharga Rp. 5.— maka kepadanya didjatuhkan hukuman sampai dua bulan pendjara atau denda sekian ratus rupiah.

Begitulah publik sangat ramai ketika pada tg. 9 Sept, jg. lalu pengadilan membuka perkara para koruptor itu, ingin tahu. Tapi alangkah ketjewanja rakjat waktu ketua pengadilan memaklumkan bahwa perkara mereka ditunda dulu, karena bukti-bukti belum tjukup.

Memang soal tunda menunda dipengadilan Lampung itu, sudah djadi kebiasaan, terbukti dengan tahanan jang berpuh-puluh dulu dalam bulan April, telah mengadakan demonstrasi, memukuli dinding² tangsi sampai djauh tengah malam. Diantara mereka jang ditahan itu ada jang sudah lebih satu tahun dalam pendjara dengan tidak diperiksi apa² tentang kesalahannya.

Dalam pada tunda-menunda itu konon chabarnja, akan terdjadi pula satu keanehan lagi, jaitu: para pegawai jang ada di Pandjang sekarang ini semuanya akan dipindahkan kepelabuhan² lain, supaya djangan ada jang tinggal lagi disana.

Tindakan ini kabarnja diambil berhubung dengan kechawatiran bahwa masih banjak lagi jang mungkin tersangkut dalam soal korupsi, takut terbongkar banjak rahasia d.s.b.

Satu lagi jang agak aneh di Lampung ialah soal daerah otonom jang dinamakan kabupaten. Kabarnja akan didjadikan hanja dua kabupaten otonom disana, jang selama ini ada tiga: Lampung Selatan, Tengah dan Utara. Jang akan ditiadakan ialah Lampung Tengah dan dimasukkan kedalam kabupaten Lampung Utara.

Alasan-alasan jang dimajukan ialah perbelandjaan (keuangan), ekonomi dan sedjarah. Dalam soal ini jang aneh

ditiadakannya kabupaten Lampung Tengah itu. Memang kenjataanja Lampung Tengah itu adalah lebih bersemangat, giat bergerak, revolusioner dan berdjwadjinamis. Karena itu kata orang jang tidak setudju penghapusan kabupaten itu, maksud meniadakan kabupaten itu ialah agar rakjatnja agak lebih lunak nanti.....

Sekian isi surat dari Sumatera Selatan itu.

Mungkin keadaan seperti itu bukan di Sumatera-Selatan sadja ada. Kabar selentingan sudah ada terdengar sampai ke Djakarta, bahwa penjakit penjakit jang disebut dalam surat diatas adalah merata diseluruh Indonesia sekarang, mulai dari Aceh sampai ke pulau-pulau Maluku (Merauke tidak bisa dimasukkan, karena itu bukan masuk Indonesia „merdeka“ sekarang, tapi masih tetap djadjahan Ned. Indië, djadi korupsi tidaknja orang disitu, adalah urusan pendjadjah Belanda, bukan urusannja pemerintah Republik Indonesia, karena itu berada diluar pagarnya surat dari Sumatera Selatan itu).

Korupsi itu biasa sekarang, malah jang tidak mau korupsi dianggap „luar biasa, gila. Tjelaka memang sudah duabelas, hampir tigabelas..... Jang pandai korupsi malahan bukan disoal uang sadja, soal kedudukan djuga, sehingga bisa naik pangkat terus menerus sampai kepuntjak kepangkatan. Entah dimana puntjak pangkat itu, si Bursock katanja tidak tahu, karena ia tidak pernah sampai kesana. Dan kalau seorang sudah lulus kesana, lantas ditjaba menarik kawan² jang korrup pula. Aturan ada jang kena perkara, lantas tidak djadi, buru-buru dipindah atau dinaikkan pangkat, djadi tidak kena apa-apa lagi.

Soal bukti sekarang, tidak penting. Dengan memainkan dan memutar-memutar segala kalimat hukum, bisa sadja orang meniadakan bukti, apa lagi kalau orang itu berpangkat tinggi, atau bukti itu sudah berdjalan dan mendjalar kelingkungan jang luas..... Ketjual bukti seekor ayam, jd. ditjuri oleh sirakjat djembel, masih terpegang ditangannya, hendak didjual, agar bisa beli makan. Kalau ini tidak bisa dibantah lagi, lantas djatuhkan sadja hukuman. Satu bulan.....

Memang ada alasan bagi orang sekarang untuk ragu. Keadilan jang hendak didjaga oleh pengadilan itu untuk siapakah? Hukum-hukum jang ada ini perhunya untuk apa dan siapa jang dilindunginja? Hukum, pengadilan dan keadilan djadi sebutan, paling ada diatas kertas, artinja sekarang, sesudah merdeka. Entahlah kalau nanti.....

(Sambungan ke halaman 11)